

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GRAFIK.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR SINGKATAN.....	6
KATA PENGANTAR.....	8
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1. Latar Belakang.....	16
1.2. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.....	16
1.2.1. Kedudukan.....	16
1.2.2. Tugas.....	16
1.2.3. Fungsi.....	17
1.3. Struktur Organisasi.....	17
1.4. Isu Strategis.....	18
1.5. Sistematika Laporan.....	19
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1. Uraian Singkat Renstra.....	21
2.1.1. Tujuan.....	21
2.1.2. Sasaran Strategis.....	21
2.1.3. Arah Kebijakan Dan Strategi.....	22
2.1.4. Program Dan Kegiatan Pembangunan.....	24
2.2. Target 2020 – 2024 Berdasarkan Rencana Strategis.....	25
2.3. Perjanjian Kinerja.....	32
2.4. Metode Pengukuran.....	35
2.5. Target 2023 Disandingkan dengan <i>baseline</i> Tahun 2022.....	38
2.6. Pohon Kinerja.....	38
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI.....	40
3.1. Sumber Daya Manusia.....	41
3.2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM.....	45
3.3. Sarana dan Prasarana.....	45
3.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	46
3.5. Analisis sumber daya manusia dan anggaran.....	47
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
4.1. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.....	49
4.2. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.....	49
4.2.1 Perbandingan Kinerja Organisasi.....	82
4.3. Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>).....	84
4.4. Realisasi Anggaran.....	90
4.5. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.....	96
4.6. Penghargaan Dan inovasi atas kinerja.....	97
4.7. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja.....	98
4.8. Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2022.....	100
4.9. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	101
BAB 5 PENUTUP.....	103
5.1. Kesimpulan.....	104
5.2. Rekomendasi.....	105
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat 2020-2024	25
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal	32
Tabel 2. 3 Revisi Pertama Perjanjian Kinerja	32
Tabel 2. 4 Revisi Kedua Perjanjian Kinerja	33
Tabel 2. 5 Perbandingan Revisi Perjanjian Kinerja	34
Tabel 2. 6 Bobot Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	35
Tabel 2. 7 Bobot perhitungan Indikator Rincian Output	36
Tabel 2. 8 Target 2023 disandingkan dengan Baseline	38
Tabel 3. 1 Daftar Sarana dan Prasarana	45
Tabel 4. 1 Cascading Program hingga Paket Kegiatan / Output	51
Tabel 4. 2 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023	61
Tabel 4. 3 Rincian Capaian Kinerja SK Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	62
Tabel 4. 4 Rincian Capaian Kinerja SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	70
Tabel 4. 5 Rincian Penyaluran Fasilitas Pembiayaan PT. SMF (Persero) Tahun 2020-2023	73
Tabel 4. 6 Rincian Penerbitan Efek Pembiayaan Tapera Tahun 2023	74
Tabel 4. 7 Pelaksanaan Penyaluran SBUM dan SSB	76
Tabel 4. 8 Progres Kinerja BBA Tahun 2023	77
Tabel 4. 9 Rincian Realisasi Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	80
Tabel 4. 10 Perbandingan Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	82
Tabel 4. 11 Sasaran Strategi Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas	85
Tabel 4. 12 Rencana Strategi dan Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024	85
Tabel 4. 13 Tabel capaian kinerja Kementerian PUPR pada SS-3	86
Tabel 4. 14 Tabel capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas	87
Tabel 4. 15 Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada Indikator penilaian rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional dan kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan oleh K/L	87
Tabel 4. 16 Tugas Dit.PPP, Kementerian PUPR dan Dit.PKP, Kementerian PPN/Bappenas	87
Tabel 4. 17 Tugas Dit.PPP, Kementerian PUPR dan Dit.Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas	88
Tabel 4. 18 Target Kinerja Direktorat Pengembangan dan Pendanaan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas	88
Tabel 4. 19 Target Kinerja Direktorat Pengembangan dan Pendanaan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024	89
Tabel 4. 20 Realisasi Anggaran Tahun 2023	90
Tabel 4. 21 Kinerja Realisasi Capaian IKK Tahun 2023	95
Tabel 4. 22 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023	99
Tabel 4. 23 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi LAKIN 2022	100
Tabel 4. 24 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	101
Tabel 4. 25 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022	102

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan Jumlah Pegawai.....	41
Grafik 3. 2 Perbandingan Kebutuhan SDM PNS Tahun 2023.....	42
Grafik 3. 3 Perbandingan SDM menurut Jenis Kelamin.....	42
Grafik 3. 4 Perbandingan SDM menurut Usia.....	42
Grafik 3. 5 Perbandingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
Grafik 3. 6 Perbandingan SDM menurut Pangkat Golongan.....	44
Grafik 3. 7 Perbandingan SDM menurut Jabatan	44
Grafik 4. 1 Perbandingan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun, 2021, 2022 dan 2023.....	84
Grafik 4. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Pembiayaan Perumahan dengan RPJMN	84
Grafik 4. 3 Perbandingan Realisasi Anggaran Bulanan TA 2023.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.....	18
Gambar 2. 1 Pohon Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	38
Gambar 4. 1 Realisasi Efek BP Tapera Per tanggal 29 Desember 2023.....	74
Gambar 4. 2 Struktur Hubungan RPJMN dengan Program yang Dijalankan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	83
Gambar 4. 3 Penghargaan dari Habitat for Humanity International, 27 Oktober 2023, di Sowun, Korea Selatan.....	97
Gambar 4. 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi.....	98

DAFTAR SINGKATAN

Aset	Sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal atau kekayaan
Badan usaha	Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi
Kelembagaan	Perihal (yang bersifat) lembaga
Kompensasi	Ganti rugi
Konstruksi	Susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya)
Konsultasi publik	Proses interaksi antara Menteri/Kepala lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU
Kontrak	Persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan
KPBU	Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak
<i>Market sounding</i>	Proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap penyiapan KPBU
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan
Panitia Pengadaan	Tim yang dibentuk PJPK yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi
Calon Pemrakarsa	Badan Usaha yang mengajukan suatu prakarsa KPBU kepada Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah
PJPK	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama - Menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau direksi badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan
Prastudi Kelayakan	Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial
Simpul KPBU	Unit kerja di kementerian/lembaga pada tingkat nasional atau unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/ atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk pelaksanaan perjanjian KPBU
Studi Kelayakan	Dokumen yang disiapkan oleh calon pemrakarsa yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap persetujuan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh surat penetapan sebagai pemrakarsa dari PJPK
Studi Pendahuluan	Kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU
Tim KPBU	Tim yang dibentuk oleh PJPK yang membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan transaksi hingga tercapai pemenuhan pembiayaan financial close, termasuk membantu panitia pengadaan dalam kegiatan Pengadaan
APBN	Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<i>Outline Business Case</i> (OBC)	Kajian awal Prastudi Kelayakan
<i>Final Business Case</i> (FBC)	Kajian akhir Prastudi Kelayakan
<i>Solicited</i>	Proyek KPBU yang diprakarsai oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
<i>Unsolicited</i>	Proyek KPBU yang diprakarsai oleh Badan Usaha
<i>Availability Payment (AP)</i>	Salah satu bentuk skema pengembalian investasi melalui pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
Prakualifikasi	Kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi KPBU
<i>Request for Proposal</i> (RfP)	Kegiatan Pelelangan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi KPBU
<i>Value for Money</i>	Nilai Manfaat Uang
AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
ANDAL	Analisis Dampak Lingkungan Hidup
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Atas izin-Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ini dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIN merupakan amanah Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan LAKIN selain merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja, tetapi juga sebagai laporan pertanggungjawaban Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja berupa input, output, dan outcome yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan direalisasikan.

LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023 disusun berdasarkan masukan dari seluruh sub bidang kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Tahun 2023. Demikian laporan ini disusun, semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 12 Januari 2024
Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan



R. Haryo Bakti Martoyoedo
NIP. 197008201997031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2023.

Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yaitu:

- 1) Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.
- 2) Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.

Program dan Kegiatan Pembangunan

Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Perumahan adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan lainnya pada sasaran program tersebut yang merupakan target yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja, yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sedangkan, sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman adalah Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali. Berikut rincian IKK pada Perjanjian Kinerja Revisi Kedua:

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan

SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	
<i>IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%
Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5 Rekomendasi Kebijakan
NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	3 NSPK
Bantuan Biaya Administrasi	13.993 Keluarga
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30 Dokumen
Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1 Kegiatan
Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1 Kegiatan
Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	1 Kegiatan
Kegiatan:	
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp29.232.033.000,00
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rp12.677.357.000,00
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp4.352.520.000.000,00

Perubahan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023 karena adanya tambahan rincian pada IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yaitu Bantuan Biaya Administrasi dengan target 13.993 keluarga.

Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tertera di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 .

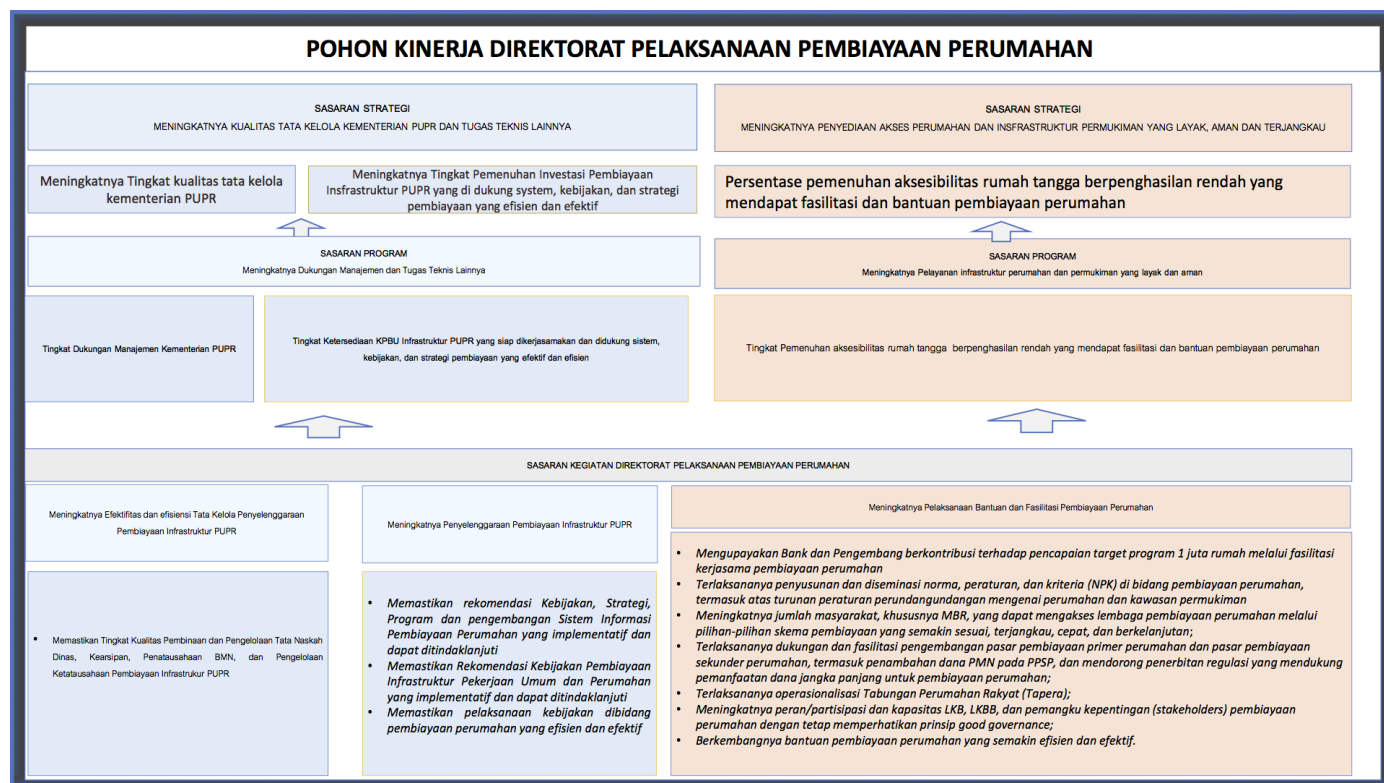
Target 2023 disandingkan dengan *Baseline* Tahun 2022

Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan baseline atau dengan dasar capaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	<i>BASLINE</i> 2022	TARGET 2023
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	25%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
<i>IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	50%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	49,35%	100%

Pohon Kinerja

Hubungan antara Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Sasaran Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Sasaran Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Strategi untuk memastikan bahwa Sasaran Kinerja tercapai adalah sebagai berikut:



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari BA.033 untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan dan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan dengan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2023 dan BA.999.07 untuk Pengelolaan Subsidi Perumahan dengan Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2023.

Penerbitan DIPA Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2023 pertama pada tanggal 30 November 2022 dengan pagu anggaran sebanyak Rp 41.909.390.000,00. DIPA kemudian mengalami 9 (Sembilan) kali revisi. Pagu anggaran sendiri mengalami 1 (satu) kali perubahan yaitu pada DIPA Revisi 09 dengan perubahan sebagai berikut:

Pada DIPA 9 Revisi ke 09 tanggal 22 Desember 2023, pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengalami penambahan pagu untuk pelaksanaan penyaluran bantuan biaya administrasi sebesar Rp55.792.000.000,00 yang diperuntukan penyaluran bantuan biaya administrasi pada 13.993 keluarga. Sehingga jumlah pagu anggaran semula Rp41.909.390.000,00 menjadi Rp97.881.390.000,00.

DIPA Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2023 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan tidak mengalami perubahan hingga 31 Desember 2023. Adapun besaran Pagu anggaran sebesar Rp4.352.520.000.000 untuk penyaluran pengelolaan subsidi perumahan dengan target penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) kepada 220.000 unit dengan pagu anggaran sebanyak Rp895.000.000.000,00 dan pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) penerbitan tahun sebelumnya (ulang tahun) sebanyak Rp3.457.520.000.000,00 yang dibayarkan kepada 754.004 unit.

Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan tidak dapat terealisasi 100% yang setara dengan 25% sehingga capaian kinerjanya Tahun 2023 adalah sebesar 24,56%. Adapun realisasi di bawah target disebabkan belum tercapainya kesepakatan pada Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan di Tahun 2023. Selain itu Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan berkontribusi dalam memberikan capaian kinerja untuk Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif sebesar 15,22%. Pada Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dapat teralisasi di atas target 100% yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja dengan nilai sebesar 106,07%.

Perbandingan Kinerja Organisasi

Perbandingan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2020	2021	2022	2023
Program Dukungan Manajemen								
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	23,25%	25,00%	24,56%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	48,38%	49,35%	106,07%

Perbandingan Kinerja Dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan kinerja Kementerian PUPR dengan Kementerian PPN/Bappenas pada Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. Perbandingan kinerja ini berdasarkan pada kesamaan kinerja pada Sasaran Strategi/ Sasaran Program/Sasaran Kegiatan. Meskipun setiap instansi memiliki fokus dan target kinerja yang berbeda, kontribusi keduanya bersifat komplementer dan saling mendukung.

Jika dibandingkan dengan Sasaran Strategi terdapat kesamaan pada SS-3 Kementerian PUPR dengan SS-3 Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Meskipun secara konteks penulisan SS terdapat perbedaan kalimat namun secara makna memiliki pengertian yang hampir serupa sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan kinerja dengan standar nasional (*Benchmarking*).

Sasaran Strategi pada Kementerian PUPR Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman melalui indikator kinerja melalui *smart living*, hampir sama maknanya dengan sasaran strategi Kementerian PPN/Bappenas yang dalam mewujudkan kebijakan pembangunan nasional menggunakan pendekatan yang visioner.

Realisasi Anggaran

Berdasarkan Struktur Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2023, alokasi Pagu Tahun 2023 sebesar Rp41.909.390.000. Pada tanggal 22 Desember 2023 terdapat penambahan Pagu Anggaran (Dipa Revisi 09) pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebesar Rp55.972.000.000 sehingga pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan termasuk BBA menjadi sebesar Rp97.881.390.000.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target yang direncanakan pada awal tahun dengan realisasi. Realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan *Integrated e-Monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status 31 Desember 2023 sebesar 91,04% atau sejumlah Rp89.109.376.147 dan kinerja fisik sebesar 92,28%

Pelaksanaan Evaluasi Anggaran

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala mingguan, bulanan, dan triwulanan. Pemantauan dan evaluasi mingguan yang dilakukan untuk melihat kinerja anggaran, kinerja penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan *update* kegiatan dan isu / permasalahan yang ditemukan saat Pelaksanaan proyek KPBU dan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Laporan Bulanan merupakan bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya untuk mengukur kinerja anggaran dan penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disandingkan dengan target kinerja bulanan, serta identifikasi dan tindak lanjut terhadap isu dan permasalahan.



BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dan isu strategis yang dihadapi.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada unit kerja yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung untuk mencapai *outcome* yang tertera pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 diukur pelaksanaannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam pertanggungjawaban dan sebagai upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja dilaporkan menggunakan Laporan Kinerja oleh masing – masing kementerian atau lembaga (K/L) yang telah diatur diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara rinci diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menggunakan kaidah penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR yang diterbitkan oleh BPIW.

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2024.

Program dan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2023 dibiayai melalui APBN rupiah murni. Selain itu Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Perumahan (BA.999.087) dari Kementerian Keuangan.

1.2. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai kedudukan dan menjalankan tugas serta fungsi, sebagai berikut:

1.2.1. KEDUDUKAN

Unit kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berada di bawah Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

1.2.2. TUGAS

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

1.2.3. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 570, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

1. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

2. Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi

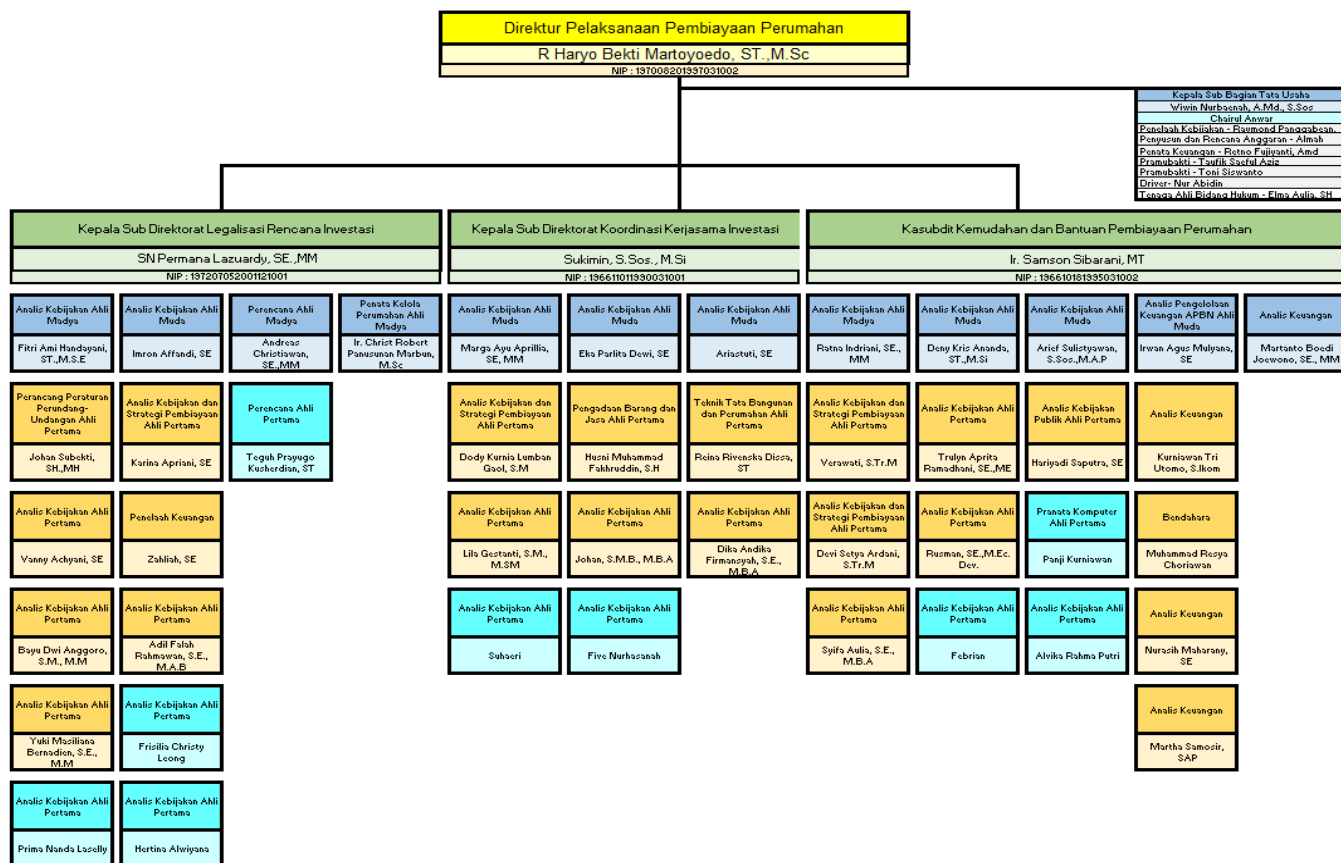
Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan.

3. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis dan tantangan pembiayaan infrastruktur meliputi isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan isu strategis yang terkait dengan bidang pembiayaan perumahan.

Isu strategis pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 yang terkait dengan penyelenggaraan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan meliputi:

- 1) Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN;
- 2) Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 3) Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
- 4) Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU;
- 5) Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
- 6) Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;

- 7) Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN;
- 8) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK;
- 9) Ketersediaan lahan yang *clear and clean* untuk proyek KPBU.

Isu strategis bidang pembiayaan perumahan meliputi:

- 1) Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan;
- 2) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi;
- 3) Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah yang ada belum sesuai dengan profil dan karakteristik MBR;
- 4) Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR;
- 5) Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Masih besarnya gap pembiayaan antara kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana jangka Panjang;
- 7) Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Setelah pembahasan Bab I “Pendahuluan” yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, sistematika selanjutnya dari penyajian laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Perjanjian Kinerja 2023, dan Target 2023 menurut renstra.

BAB III Kapasitas Organisasi

Pada Bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

BAB IV Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja,

BAB V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung pada Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan,



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini merupakan penjelasan mengenai Pagu, Rencana Anggaran, serta Capaian Realisasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan disusun dalam rangka perwujudan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, dan Renstra DJPI. Dokumen Renstra memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat yang diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai tugasnya.

2.1.1. TUJUAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan beberapa tujuan Kementerian dalam 2020 – 2024 yang terdiri dari:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko / kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi.

Tujuan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Percepatan Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui pembiayaan kreatif dan inovatif;
2. Peningkatan Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

Adapun tujuan bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan Tahun 2020 – 2024 adalah untuk meningkatkan daya beli dan aksesibilitas MBR ke lembaga-lembaga pembiayaan perumahan yang didukung sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel.

2.1.2. SASARAN STRATEGIS

5 (lima) Sasaran Strategi Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional.
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak.
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Professional.

5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yaitu:

- 1) Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.
- 2) Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.

2.1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat – pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium PUPR 2020 – 2024;
5. Percepatan proses perencanaan dan penyiapan KPBU;
6. Percepatan proses pengadaan KPBU;
7. Pengembangan skema pembiayaan KPBU;
8. Membentuk unit pelaksana teknis / memanfaatkan unit kerja eksisting yang berfungsi sebagai paying agent serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
9. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel;
10. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
11. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
12. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*);
13. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
14. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

STRATEGI

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan RPJMN 2020 – 2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi yang diterapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*). Strateginya adalah sebagai berikut:

- I. Sisi Permintaan (*Demand Side*)
 - a. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;

- c. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
- d. Pengembangan layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan

2. Sisi Patokan (*Supply Side*)

- a. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dengan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
- b. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
- c. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
- d. Pemanfaatan tanah milik negara / BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
- e. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

3. *Enabling Environment*

- a. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
- b. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
- c. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
- d. Pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;
- e. Pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) Perumahan Nasional dan daerah.

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*).

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai apa yang telah tertuang dalam pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjalankan 2 (dua) Sasaran Program, yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dan **Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman**.

Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Perumahan adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan**. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan lainnya pada sasaran program tersebut yang merupakan target yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja, yaitu **Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**.

Sedangkan, sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman adalah **Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan**.

2.2. TARGET 2020 – 2024 BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 – 2024 berdasarkan Matriks Program, kegiatan, dan Pendanaan yang terdapat Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Target berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1,544,237	2,001,581	383,920	382,472	394,183	4,706,394
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN									208,666	333,429	314,797	326,456	335,434	1,518,782
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)							118,182	112,207	118,325	123,798	129,562	602,075
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		%	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44							
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)							118,182	112,207	118,325	123,798	129,562	602,075
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12							
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	118,182	112,207	118,325	123,798	129,562	602,075
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
I	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	2	2	2	2	2	2						
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
						2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT KEGIATAN:																
I	Opersonalisasi Kantor Direktorat		Layanan	I	I	I	I	I	I	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	I	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	Layanan	I	I	I	I	I	I	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			%	100	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	205,872	916,707
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:																	
I	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif		%	100	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	205,872	916,707
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			%	100	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	205,872	916,707
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:																	
I	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif		%	100	100	100	100	100	100	100	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	205,872	916,707
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan																	
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	100	50,244	170,000	172,870	180,158	183,372	183,372	756,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan		%	25	25	25	25	25	25	25	9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	74,975	229,197

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
						2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan												9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
	OUTPUT KEGIATAN:																
1	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan				Rekom. Kebijakan	2	1	1	1	1	6	600	500	750	1,000	1,000	3,850
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	1	1	1	1	1	5	300	500	750	1,000	1,000	3,550
	2	Jumlah Penyusunan identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	1	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	300
2	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan				Rekom. Kebijakan	1	1	1	1	1	5	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	1	1	1	1	1	5	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
3	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan				Rekom. Kebijakan	3	2	2	2	2	11	1,750	5,750	30,000	35,000	36,500	109,000
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	2	2	1	1	1	7	875	5,750	15,000	17,500	18,250	57,375
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	1	0	1	1	1	4	875	0	15,000	17,500	18,250	51,625
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan				Rekom. Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500
	1	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan		Kesepakatan	1	2	2	2	2	2	9	4,000	4,096	21,000	25,000	26,307	80,403
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	3	2	2	2	2	2	11	3,500	2,096	17,000	20,000	20,307	62,903
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	2	9	500	2,000	4,000	5,000	6,000	17,500
6	NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan		NSPK	0	1	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500
	1	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan		Laporan	1	1	1	1	1	1	5	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		Laporan	1	1	1	1	1	1	5	150	300	300	300	168	1,218
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	5	150	300	300	300	168	1,218
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau											1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:																
1	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni		%	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	59,48		1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman				%	100	100	100	100	100	100						
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:																
I	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612
KEGIATAN 4: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan				%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	56,015	58,750	3,187,612
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
I	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			%	50	50	50	50	50	50	1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan			%	50	50	50	50	50	50	27,840	27,840	28,675	29,535	30,422	144,312
KOORDINATOR: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan																
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan											1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
	OUTPUT KEGIATAN:															
I	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	4	4	5	5	5	23	3,250	3,250	7,100	7,760	8,486	29,846
	I	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		Rekom. Kebijakan	3	2	2	2	2	11	2,500	1,500	4,400	4,840	5,324	18,564
	2	Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan		Rekom. Kebijakan	1	1	2	2	2	8	750	1,000	2,200	2,420	2,662	9,032

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	0	1	1	1	1	4	0	750	500	500	500	500	2,250
2	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782	
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782	
3	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan		Laporan	4	2	2	2	2	12	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728	
	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	2	2	2	2	12	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728	
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Rumah Tangga	31,823	39,684	312	0	0	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343	
	1	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	31,823	39,684	312	-	-	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343	
5	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka		Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000	
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000	
		SSB (BA.999.07)	Rumah Tangga	175,000	100,000	0	0	0	275,000	4,657,982	5,969,486	4,930,376	4,865,899	4,804,866	25,228,609	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		SBUM (BA.999.07)		Rumah Tangga	263,000	157,500	200,000	220,000	220,000	1,060,500	1,064,000	945,000	1,200,000	1,320,000	1,320,000	5,849,000
6	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Layanan	1	1	1	0	0	3	4,500	5,000	5,000	0	0		14,500
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	0	0	3	4,500	5,000	5,000				14,500
7	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	3,000	10,100
	1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	3,000	3,000	3,000	3,000	10,100
		SMF (Dana Masyarakat)		Rumah Tangga	8,460	10,000	10,000	10,000	11,540	50,000						
		Tapera (Dana Masyarakat)		Rumah Tangga	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000	500,000						

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali. Di bawah ini merupakan Perjanjian Kinerja awal yang dilakukan pada bulan Januari 2023 dengan target kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%
SP. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	
<i>IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	100%
SK. Meningkatkan Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%
Kegiatan:	
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp29.232.033.000,00
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rp12.677.357.000,00
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp4.352.520.000.000,00

Pada Perjanjian Kinerja awal, pagu anggaran bagi Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan adalah sebanyak Rp29.232.033.000,00; Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan sebanyak Rp12.677.357.000,00; dan Kegiatan Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07) Rp4.352.520.000.000,00

Revisi pertama Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dilakukan pada Bulan Oktober 2023, adapun revisi ini dilakukan karena adanya revisi pada Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon I/Direktur Jenderal. Tidak ada perubahan nilai anggaran pada kegiatan dari perjanjian kinerja awal namun ada penambahan rincian IKK yang disajikan Sehingga Perjanjian Kinerja revisi pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Revisi Pertama Perjanjian Kinerja

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
SP. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	

<i>IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%
Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5 Rekomendasi Kebijakan
NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	3 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30 Dokumen
Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1 Kegiatan
Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1 Kegiatan
Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	1 Kegiatan
Kegiatan:	
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp29.232.033.000,00
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rp12.677.357.000,00
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp4.352.520.000.000,00

Pada Perjanjian Kinerja revisi pertama disampaikan pendetailan informasi target kinerja berdasarkan IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dan IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, namun hingga saat ini masih dalam proses penandatanganan oleh Pimpinan.

Revisi kedua Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dilakukan pada Bulan Desember 2023, adapun revisi ini dilakukan karena adanya tambahan penyaluran bantuan biaya administrasi kepada 13.993 keluarga pada IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan revisi. Penambahan rincian IKK ini mengakibatkan perubahan nilai anggaran pada perjanjian kinerja sebelumnya. Rincian IKK pada Perjanjian Kinerja revisi kedua adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Revisi Kedua Perjanjian Kinerja

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	
<i>IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%
Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5 Rekomendasi Kebijakan
NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	3 NSPK
Bantuan Biaya Administrasi	13.993 Keluarga
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30 Dokumen
Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1 Kegiatan

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET
Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka		I Kegiatan
Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		I Kegiatan
Kegiatan:		
4. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		Rp29.232.033.000,00
5. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan		Rp12.677.357.000,00
6. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)		Rp4.352.520.000.000,00

Perbandingan perubahan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perbandingan Revisi Perjanjian Kinerja

	PK Awal	PK Revisi I	PK Revisi II
Target	2 (dua) target Sasaran Kegiatan: 1. SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 2. SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	<i>Tetap</i>	<i>Tetap</i>
Kegiatan	1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan: Rp29.232.033.000,00 2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan: Rp12.677.357.000,00 3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07): Rp4.352.520.000.000,00	<i>Tetap</i>	1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan: Rp85.204.033.000,00 2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan: Rp12.677.357.000,00 3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07): Rp4.352.520.000.000,00

2.4. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tertera di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Bobot Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET	KOMPOSIT INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	BOBOT
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target		50,00%
				Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		50,00%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman							
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target		30,00%
				Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target		50,00%
				Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target		20,00%

Bobot perhitungan Indikator Rincian Output berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Bobot perhitungan Indikator Rincian Output

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)			TARGET	KOMPOSIT INDIKATOR KINERJA			%	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT		BOBOT
		PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
		SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya										
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	50%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investassi Pembiayaan Perumahan					15,00%	
						Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan					20,00%	
						Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan					35,00%	
						Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan					20,00%	
						Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan					10,00%	
					50%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan					35,00%	
						Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan						
						Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan						45,00%
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan					20,00%							
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
		SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman										
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera	30%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (SMF)					100%	
						Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (Tapera)						

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	KOMPOSIT INDIKATOR KINERJA	%	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT	BOBOT
				Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM)	40,00%
						Jumlah penyaluran FLPP	60,00%
						Jumlah penyaluran BBA	
				Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan	20%	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	50,00%
						Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	
						Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	
						Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	20,00%
						Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	15,00%
						Jumlah Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	10,00%
						Jumlah Pendampingan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	5,00%

2.5. TARGET 2023 DISANDINGKAN DENGAN BASELINE TAHUN 2022

Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan *baseline* atau dengan dasar capaian pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

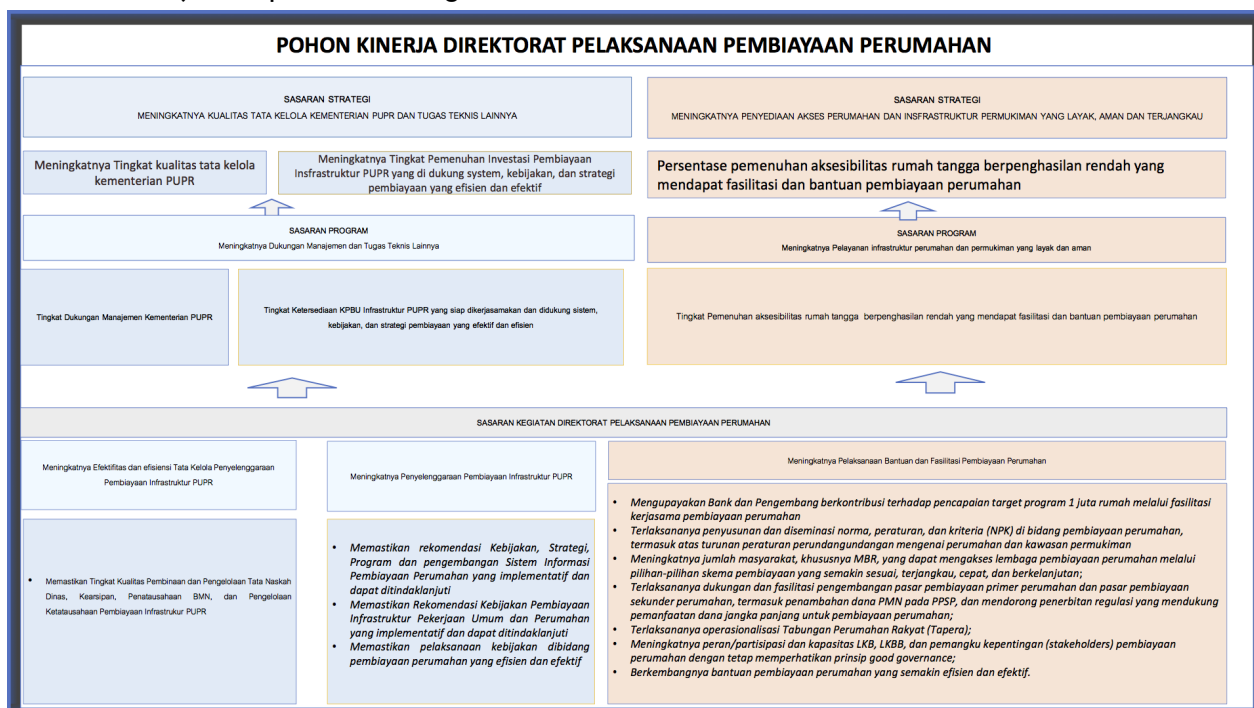
Tabel 2. 8 Target 2023 disanding dengan Baseline

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	BASLINE 2022	TARGET 2023
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	25%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	49,35%	100%

Untuk Target IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2022 menggunakan target 50%. Namun telah bubarnya PPDPP, maka Indikator Kinerja yang semula 2 Indikator kinerja menjadi 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan maka target kinerja Tahun 2023 100% sepenuhnya dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

2.6. POHON KINERJA

Hubungan antara Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Sasaran Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Sasaran Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Strategi untuk memastikan bahwa Sasaran Kinerja tercapai adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Pohon Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan Pohon Kinerja di atas, Strategi untuk dapat mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah dengan Memastikan Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsiaph, Penatausahaan BMN, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur PUPR.

Strategi untuk dapat mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut:

1. Memastikan rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program, dan pengembangan Sistem Informal Pembiayaan Perumahan yang implementatif dan dapat ditindaklanjuti;
2. Memastikan Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Implementatif dan dapat ditindaklanjuti;
3. Memastikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan yang efisien dan efektif.

Strategi untuk dapat mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan bank dan pengembang berkontribusi terhadap pencapaian target program 1 juta rumah melalui fasilitasi kerja sama pembiayaan perumahan;
3. Terlaksananya penyusunan dan diseminasi norma, peraturan, dan kriteria (NPK) di bidang pembiayaan perumahan, termasuk atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;
4. Meningkatnya jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses Lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan – pilihan skema pembiayaan yang semakin sesuai, terjangkau, cepat, dan berkelanjutan;
5. Terlaksananya dukungan dan fasilitasi pengembangan pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PPSP, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka Panjang untuk pembiayaan perumahan;
6. Terlaksananya operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);
7. Meningkatnya peran / partisipasi dan kapasitas LKB, LKBB, dan pemangku kepentingan (stakeholders) pembiayaan perumahan dengan tetap memperhatikan prinsip good governance;
8. Berkembangnya bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien dan efektif.

BAB 3

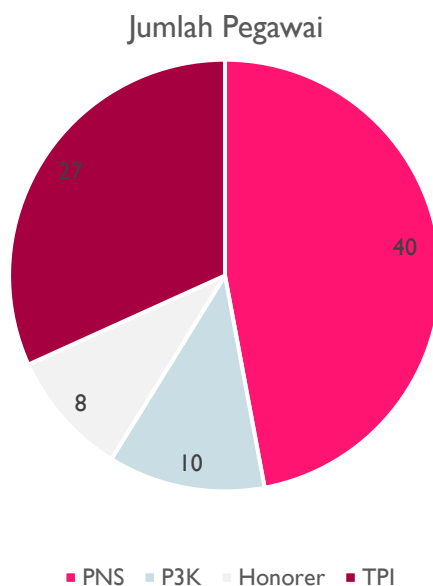
KAPASITAS ORGANISASI

Bab ini menguraikan pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bab ini juga menjelaskan potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

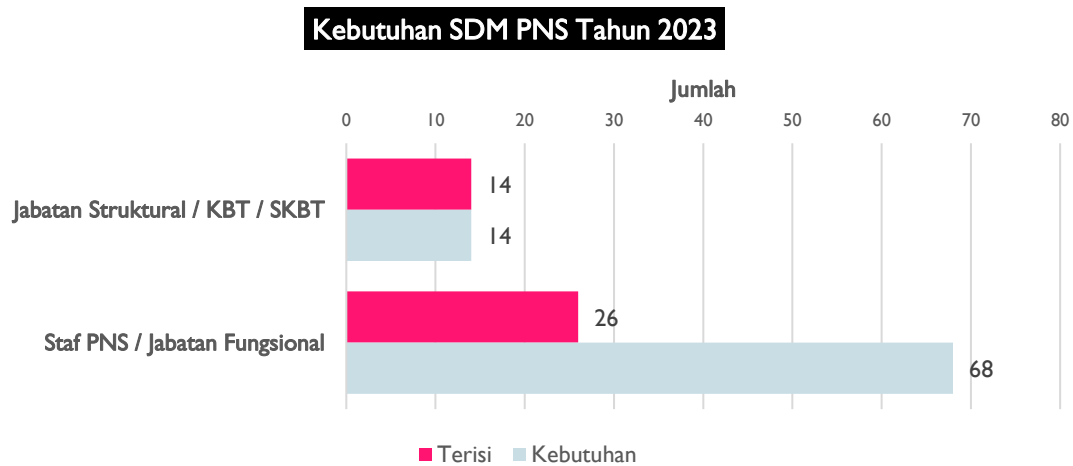
3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jumlah SDM turut mempengaruhi tercapainya kinerja yang telah direncanakan. Jumlah pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebanyak 85 orang dengan komposisi 40 orang PNS, 10 orang PPPK, 8 orang Honorer, 27 orang Tenaga Pendukung Individual (TPI).



Grafik 3. 1 Perbandingan Jumlah Pegawai

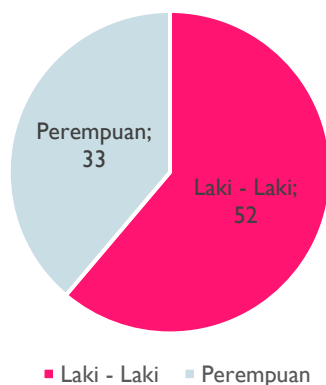
Berdasarkan pembahasan pemetaan pegawai terkait kebutuhan, bezzeting, dan formasi PNS, kebutuhan pegawai di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebanyak 108 orang pegawai. Jumlah PNS saat ini adalah sebanyak 40 orang dan masih membutuhkan 68 orang PNS. Kebutuhan PNS saat ini dibantu oleh Non PNS Substansi dan Pendukung.



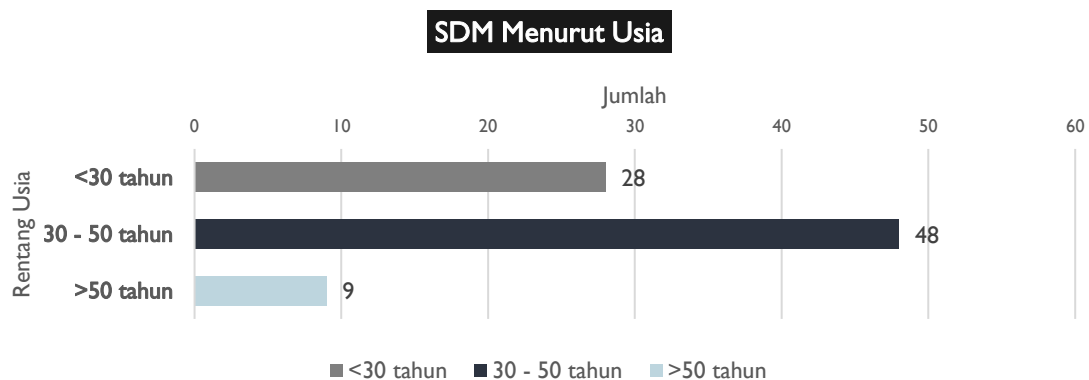
Grafik 3. 2 Perbandingan Kebutuhan SDM PNS Tahun 2023

Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas 33 orang perempuan dan 52 orang laki-laki dengan rentang usia <30 tahun sebanyak 28 orang, usia 30 – 50 tahun sebanyak 48 orang, dan usia >50 tahun sebanyak 9 orang.

SDM Menurut Jenis Kelamin

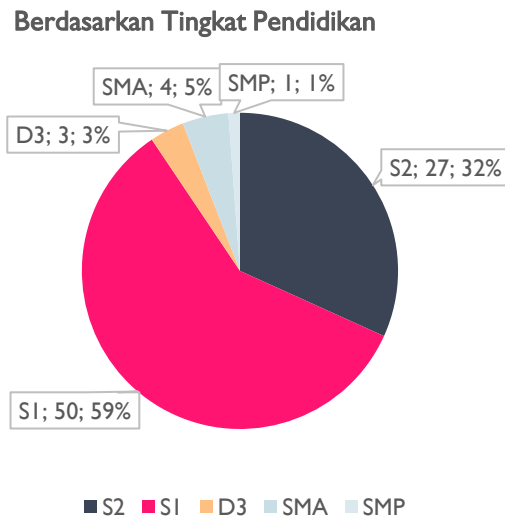


Grafik 3. 3 Perbandingan SDM menurut Jenis Kelamin

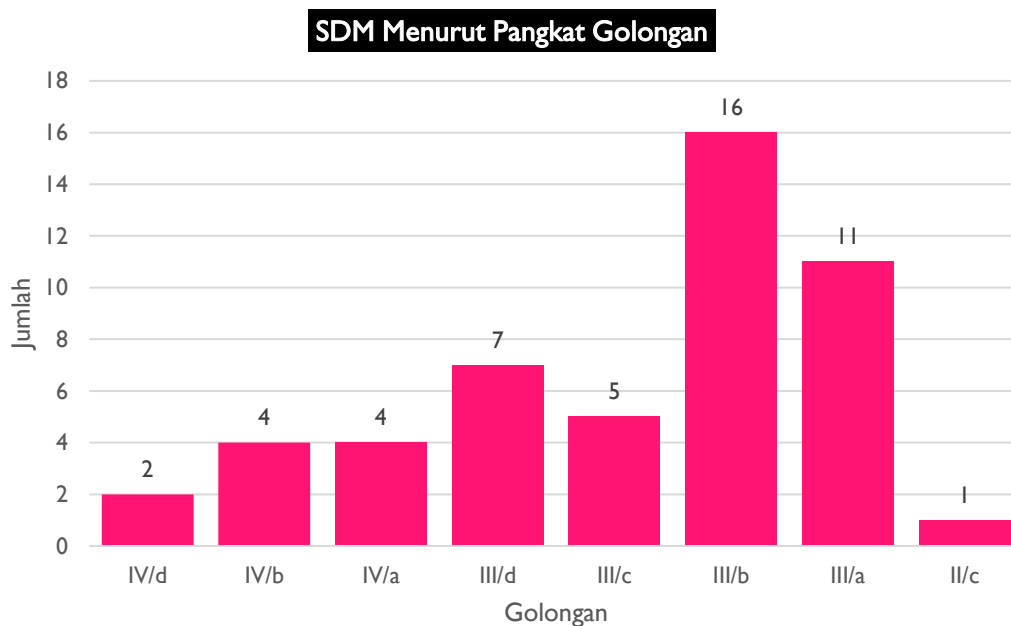


Grafik 3. 4 Perbandingan SDM menurut Usia

Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 27 orang, S1 sebanyak 50 orang, D3 sebanyak 3 orang, SMA sebanyak 4 orang dan SMP sebanyak 1 orang, komposisi ini mendukung profesionalisme dalam melakukan penelaahan kasus, pengelolaan data dan informasi yang menjadi kekuatan dalam perencanaan program dan kegiatan.

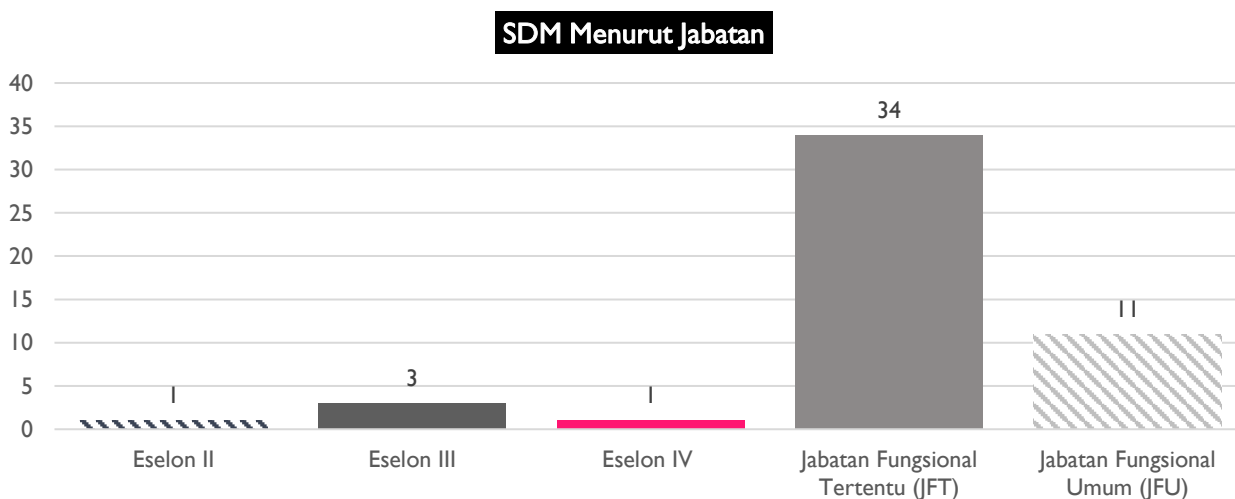


Grafik 3. 5 Perbandingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 3. 6 Perbandingan SDM menurut Pangkat Golongan

Berdasarkan pangkat dan golongan ASN, komposisi SDM di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebanyak 2 orang golongan IV/d, 4 orang IV/b, 4 orang IV/a, 7 orang III/d, 5 orang III/c, 16 orang III/b, 11 orang III/a dan 1 orang dengan pangkat golongan II/c menggambarkan kecukupan pengalaman dalam merencanakan, menyusun dan menyiapkan serta melaksanakan kebijakan dan program.



Grafik 3. 7 Perbandingan SDM menurut Jabatan

Komposisi SDM Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menurut jabatan adalah terdiri dari 1 orang Eselon II, 3 orang Eselon III, 1 orang Eselon IV, 34 orang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu, dan 11 orang memiliki Jabatan Fungsional Umum. Jenis Jabatan Fungsional pegawai di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
2. Arsiparis;
3. Perencana;
4. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Analis Kebijakan.

3.2. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SDM

Pada Tahun 2023, sebanyak 40 ASN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Magister Super Spesialis
2. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level I
3. Pelatihan Pelaksanaan Anggaran
4. Pelatihan KPBU Sektor Perumahan
5. Pelatihan Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
6. Pelatihan *Photography* dan *Videography*
7. Pelatihan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian PUPR
8. *Workshop* Tata Cara Penyelenggaraan Evaluasi SAKIP di DJPI TA 2023

3.3. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Apabila sarana dan prasarana tidak tersedia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan. Data berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Direktorat Pembiayaan Perumahan selama tahun 2023 (Lantai 3 Wing 2 Gd. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan tidak termasuk).

Tabel 3. 1 Daftar Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Cross Cut Paper Shredder	6	Baik
2	Filling Cabinet	16	Baik
3	Filling Cabinet Kaca	15	Baik
4	Kursi Rapat	10	Baik
5	Kursi Tamu Ruang Direktur	4	Baik
6	Laptop Merk Asus	1	Baik
7	Laptop Merk Dell	1	Baik
8	Lemari Buku Pendek Ruang Rapat	2	Baik
9	Lemari Buku Ruang Direktur	1	Baik
10	Meja dan Kursi Kerja	43	Baik
11	Meja Rapat	1	Baik
12	Meja Tamu Besar Ruang Direktur	1	Baik
13	Meja Tamu Kecil Ruang Direktur & Kasubdit	4	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
14	PC Merk Dell	5	Baik
15	PC Merk HP	9	Baik
16	PC Merk Lenovo	10	Baik
17	PC Merk Think Center	4	Baik
18	Printer Brother	1	Baik
18	Printer Colour HP Laserjet M254nw	4	Baik
20	Printer HP Laser JetPro M12w	13	Baik
21	Printer Laser Jet Pro 400 Colour	1	Baik
22	Projector	1	Baik
23	Scanner ScanSnap s1300i	1	Baik
24	Screen Projector	1	Baik
25	Sofa Ruang Direktur & Kasubdit	8	Baik
26	Web Cam	2	Baik

Semua Sarana dan prasaran yang berada di Direktorat Pembiayaan Perumahan selama tahun 2023 dalam kondisi baik.

3.4. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari BA.033 untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan dan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan dengan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2023 dan BA.999.07 untuk Pengelolaan Subsidi Perumahan dengan Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2023.

BA.033

Penerbitan DIPA Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2023 pertama pada tanggal 30 November 2022 dengan pagu anggaran sebanyak Rp 41.909.390.000,00. DIPA kemudian mengalami 9 (Sembilan) kali revisi:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Revisi ke 01: 28 Desember 2022 | 6. Revisi ke 06: 31 Juli 2023 |
| 2. Revisi ke 02: 20 Februari 2023 | 7. Revisi ke 07: 09 November 2023 |
| 3. Revisi ke 03: 06 April 2023 | 8. Revisi ke 08: 12 Desember 2023 |
| 4. Revisi ke 04: 03 Juli 2023 | 9. Revisi ke 09: 22 Desember 2023 |
| 5. Revisi ke 05: 14 Juli 2023 | |

Pagu anggaran sendiri mengalami 1 (satu) kali perubahan yaitu pada DIPA Revisi 09 dengan perubahan sebagai berikut: Pada DIPA 9 Revisi ke 09 tanggal 22 Desember 2023, pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengalami penambahan dana untuk pelaksanaan penyaluran bantuan biaya administrasi sebesar Rp55.792.000.000,00 yang diperuntukan penyaluran bantuan biaya administrasi pada 13.993 keluarga. Sehingga jumlah pagu anggaran semula Rp41.909.390.000,00 menjadi Rp97.881.390.000,00.

BA999.07

DIPA Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2023 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan tidak mengalami perubahan hingga 31 Desember 2023. Adapun besaran Pagu Anggaran sebesar Rp4.352.520.000.000 untuk penyaluran pengelolaan subsidi perumahan dengan target penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) kepada 220.000 unit dengan pagu anggaran sebanyak Rp895.000.000.000,00 dan pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) penerbitan tahun sebelumnya (ulang tahun) sebanyak Rp3.457.520.000.000,00 yang dibayarkan kepada 754.004 unit.

3.5. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran menjadi pilar esensial dalam pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi SDM melibatkan identifikasi kebutuhan, penempatan, dan pengembangan karyawan, sementara analisis anggaran memastikan alokasi dana yang optimal. Integrasi data SDM dengan anggaran membentuk landasan strategis, memungkinkan pengelolaan sumber daya secara cerdas. Keselarasan ini memperkuat keseimbangan antara keberlanjutan organisasi dan pemberdayaan tim, menciptakan lingkungan yang produktif dan finansial yang terkendali pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Pada Tahun 2022 Jumlah Pegawai ASN Direktorat sebanyak 49 Orang dengan komposisi 41 orang PNS dan 8 orang Honorer. Pada Tahun 2023 Jumlah Pegawai ASN sebanyak 58 dengan komposisi 40 orang PNS, 10 orang PPPK, dan 8 orang Honorer. Adanya penambahan jumlah pegawai berbanding lurus dengan penambahan anggaran pada gaji pegawai, namun adanya penambahan jumlah pegawai menjadi penting karena pertumbuhan organisasi, proyek ekspansif, dan beban kerja yang terus meningkat sehingga dibutuhkan personal tambahan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan menambah tenaga kerja, efisiensi operasional dapat ditingkatkan, mengurangi beban kerja yang berlebihan, dan mempercepat pencapaian tujuan. Penambahan pegawai juga mendukung diversifikasi keahlian, memperkuat tim, dan merespon dinamika pasar. Selain itu, adanya tenaga tambahan dapat meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas, memastikan kelancaran operasional, serta menciptakan lingkungan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang seimbang dan berkelanjutan.



BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2023.

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan melalui upaya strategis yang terarah dan terimplementasi. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan pelaporan dan pembahasan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten. Pada Tahun 2023 mekanisme pembahasan akuntabilitas evaluasi capaian kinerja dilakukan per triwulanan bersama mitra kerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dilakukan per bulan.

Penerapan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan sesuai standar dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, upaya peningkatan SDM juga dilakukan melalui mengikutkan pegawai untuk mengikuti *workshop* penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan DJPI pada 27 Oktober 2023 dan *workshop* tata cara penyelenggaraan evaluasi SAKIP berdasarkan Permen PANRB No.88 Tahun 2021 pada 16 Maret 2023.

Berdasarkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dit.PPP telah menindaklanjutinya. Pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022, rekomendasi pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah mendorong pusdatin dan Sekjen dalam mengembangkan aplikasi e-Sakip dan telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Dit.PSSPP, DJPI dalam mengembangkan aplikasi e-Sakip.

4.2. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan kegiatan yang akuntabel memanfaatkan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah. Akuntabilitas diharapkan dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran secara jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dilakukan berdasarkan metode perhitungan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan target pada Rencana Strategis dengan kinerja yang telah dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Pada Perjanjian Kinerja, target kinerja yang harus dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan merupakan Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 2023 sebesar 25%;
2. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan target capaian pada Tahun 2023 sebesar 100%.

Cascading merupakan struktur penurunan program hingga paket kegiatan, Struktur penurunan tersebut terdiri atas Sasaran Strategis yang diturunkan menjadi Sasaran Program yang dibagi menjadi beberapa Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) kemudian diturunkan Kembali menjadi Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja (IKSK). Sasaran Kegiatan dan IKSK diturun menjadi beberapa Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang diturunkan menjadi Rincian Output (RO) dengan Indikator Rincian Output. RO dan Indikator RO diturunkan menjadi Paket Kegiatan yang dilaksanakan. Target yang harus dicapai program berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan DIPA dengan struktur *cascading* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. / Cascading Program hingga Paket Kegiatan / Output

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Ouput / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Kebijakan Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	1	Rekom. Kebijakan
							Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	1	0	Rekom. Kebijakan
							Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Proyek Revitalisasi Rusun Pasar Jumat	2	1	Rekom. Kebijakan
									Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Dukungan KPBU Perumahan			Rekom. Kebijakan
							Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan	2	1	Rekom. Kebijakan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan		1	Rekom. Kebijakan
						Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan	Penyusunan NSPK KPBU Perumahan	1	1	NSPK
						Kemitraan	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Dukungan Transaksi KPBU Perumahan	2	2	Dokumen
								Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Pendampingan penyiapan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	2	4	Kesepakatan
						Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan	1	3	Laporan
									Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan			Laporan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									KPBU Sektor Perumahan			
									Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan			Laporan
							Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	I	N/A	Laporan
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Koordinasi	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (SMF)	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tapera (SMF)	10.000	N/A	Rumah Tangga
								Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (Tapera)	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tapera (Tapera)	125.000		Rumah Tangga

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
						Bantuan Keluarga	Bantuan Biaya Administrasi	Jumlah Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi	Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA)	-	13.993	Rumah Tangga
						Subsidi kepada Keluarga	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SSB)	Penyaluran SSB (BA.999.07)	0	754.004	Rumah Tangga
								Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM)	Penyaluran SBUM (BA.999.07)	220.000	220.000	Rumah Tangga
						Kebijakan Saranan dan Prasarana	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Kajian Pembiayaan Perolehan Sarusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	2	I	Rekom. Kebijakan
									Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR		I	Rekom. Kebijakan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
								Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatangan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyusunan dan Penyiapan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan	2	I	Rekom. Kebijakan
								Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan		I	Rekom. Kebijakan
								Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Koordinasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan	I	I	Rekom. Kebijakan
						Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Pengembangan Skema dan Mekanisme Pembiayaan Perolehan Sarusun dengan Sewa Beli	2	I	NSPK

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		I	NSPK
									Penyusunan Tata Laksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM		I	NSPK
						Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	2	I	Laporan
									Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan		I	

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									Pembiayaan Perumahan Wilayah 2			
									Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3		I	
									Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I		9	Laporan
									Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2		9	Laporan
									Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan		9	Laporan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									Perumahan Wilayah 3			
						Pelayanan Publik Lainnya	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	I	I	Layanan
							Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Jumlah Penyaluran	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan PHLN	I	I	Layanan

Terdapat perbedaan target pada Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024 dan target pada DIPA TA 2023. Beberapa Rincian Output yang memiliki perbedaan target pada Renstra dan DIPA adalah sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Rincian Output Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan. Pada Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024 adalah sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan, namun pada DIPA tidak dianggarkan. Pada Tahun 2023 walaupun tidak dianggarkan Dit.PPP dapat menyelesaikan 1 (satu) studi pendahuluan yaitu Rusun Perkotaan Surabaya - Tambak Wedi.
2. Bantuan Biaya Administrasi dengan Indikator Rincian Output Jumlah Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) tidak ada dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 namun pada DIPA revisi ke 09 terdapat target sebanyak 13.993 rumah tangga.
3. Penyaluran SSB (BA.999.07) dengan indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SSB) pada Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 tidak memiliki target unit namun pada DIPA TA 2023 target sebanyak 754.004 unit.
4. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Rincian Output Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan pada Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024 adalah sebanyak 2 (dua) Laporan dan pada DIPA TA 2023 target laporan sebanyak 30 (tiga puluh) Laporan.
5. Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dengan Indikator Rincian Output Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan PHLN pada Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 memiliki target 1 (satu) layanan. Pada Tahun 2023 dengan Indikator Rincian Output yang sama Dit.PPP juga memberikan layanan operasional untuk mendukung pelaksanaan bantuan biaya administrasi.
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Rincian Output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan. Pada Renstra Kementerian PUPR target sebanyak 1 (satu) laporan, namun pada DIPA terdapat 3 (tiga) laporan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 karena Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Perumahan dilakukan terhadap masing – masing tahapan KPBU Sektor Perumahan, yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Penyiapan, dan Tahap Transaksi.
7. Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Rincian Output Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024 adalah sebanyak 1 (satu) laporan, namun pada DIPA Tahun Anggaran 2023 *Not Applicable* (N/A) dikarenakan mengalami *Automatic Adjustment* sejak awal Tahun Anggaran 2022.

8. Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan melalui SMF dan Tapera memiliki target masing – masing sebanyak 10.000 Rumah Tangga dan 125.000 Rumah Tangga, namun pada DIPA Tahun Anggaran 2023 *Not Applicable* (N/A) dikarenakan sumber pembiayaan untuk Fasilitas Pembiayaan Perumahan berasal dari PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), namun Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mendukung pembiayaan tersebut melalui Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tapera. Target Pembiayaan Perumahan oleh BP Tapera pada Tahun 2023 sendiri adalah sebanyak 12.072 Rumah Tangga mengacu pada surat Kementerian Keuangan No. S-13/MK.05/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang penyampaian pengesahan atas RKAT BP Tapera TA 2023.

Berdasarkan *cascading* di atas disandingkan dengan Perjanjian Kinerja dan Paket Kegiatan TA 2023, maka Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan didapatkan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian
Program Dukungan Manajemen						
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	24,56%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%	106,07%

Berikut adalah uraian capaian kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2023. Pada Program Dukungan Manajemen terdapat Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan yang harus dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2023.

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan tidak dapat terealisasi 100% yang setara dengan 25% sehingga capaian kinerjanya Tahun 2023 adalah sebesar 24,56%. Adapun nilai capaian kinerja di bawah target disebabkan belum tercapainya 2 kesepakatan dari 4 Kesepakatan Proyek KPBU Bidang Perumahan yang di targetkan pada DIPA. Belum tercapainya pada 2 Kesepakatan proyek KPBU Bidang perumahan ini dikarenakan proyek tersebut masih dalam proses penyesuaian pada masa konsesi kerjasama dan finansial model yang disesuaikan berdasarkan arahan Pimpinan.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berkontribusi dalam memberikan capaian kinerja untuk Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif sebesar 10,77%.

Pada Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan IKK Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dapat terealisasi di atas target 100% sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 106,07%. Adapun pendukung keberhasilan ini dapat diperoleh dari:

1. Realisasi Penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan - FLPP (BA.999.03) sebesar 229.000 unit di atas target renstra 220.000 unit.
2. Realisasi Penyaluran Program SMF sebesar 333.988 unit di atas target Renstra 10.000 unit.
3. Realisasi Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan sebanyak 4 rekomendasi kebijakan di atas target renstra 2 rekomendasi kebijakan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebanyak 13.160 rumah tangga atau senilai Rp52.513.355.147,00 pada Tahun 2023, dimana program penyaluran ini tidak terdapat pada renstra Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024.

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dihasilkan berdasarkan rincian capaian dari output paket sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Rincian Capaian Kinerja SK Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

Program Dukungan Manajemen							
(SS2) Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan manajemen dan Tugas Lainnya							
IKSP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan							
IKK: Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan							
Target			Capaian				
25,00%			24,56%				
No	Jenis Indikator Komposit IKK / KRO / RO / Indikator RO / Paket Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Bobot (%)	Capaian (%)
Tingkat Implementasi Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan		%	100%	100%	100%	50%	50%
I. Kebijakan Sarana dan Prasarana		%	100%	100%	85%	85%	85%
A	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	15%	15%
I	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	I	I	100%	100%	100%
a	Perencanaan dan Penganggaran Serta Identifikasi Potensi Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	I	I	100%	100%	100%
B	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	20%	20%
I	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	I	I	100%	100%	100%
a	Studi Pendahuluan Proyek KPBU Rusun Perkotaan Surabaya - Tambak Wedi	Rekom. Kebijakan	I	I	100%	100%	100%
C	Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	35%	35%
I	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	I	I	100%	100%	100%
a	Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Rusun Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Surabaya	Rekom. Kebijakan	I	I	100%	100%	100%

D	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	20%	20%
I	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	2	2	100%	100%	100%
a	Rekomendasi Kebijakan Usulan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Rusun Perkotaan Surabaya	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
b	Rekomendasi Kebijakan Usulan Penjaminan Proyek KPBU Karawang Spuur	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
II. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		%	100%	100%	10%	10%	10%
E	NSPK Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
I	Jumlah Penyusunan NSPK Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	100%	100%	100%
a	Pedoman/prototype Rumah Sederhana Hijau untuk Bangunan Klas Ia	NSPK	1	1	100%	100%	100%
Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan		%	100%	96,50%	96,50%	50%	48,25%
I. Kemitraan		%	100%	100%	100%	35%	21%
F	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	%	100%	96,50%	100%	100%	80%
I	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	2	2	100%	40%	40%
a	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	Dokumen	1	1	100%	100%	100%
b	Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan	Dokumen	1	1	100%	100%	100%
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	4	2	100%	60%	30%
a	Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	4	2	100%	100%	50%
II. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		%	100%	100%	100%	65%	65%
G	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	45%	45%
I	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	6	100%	100%	100%
a	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan	Laporan	1	2	100%	100%	100%
b	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan	Laporan	1	2	100%	100%	100%
c	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan	Laporan	1	2	100%	100%	100%
H	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	20%	20%
I	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%	100%	100%
a	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2023	Laporan	1	1	100%	100%	100%
SK: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			100%	100%	98,25%	25%	24,56%

Berikut adalah uraian capaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2023 pada Program Dukungan Manajemen berdasarkan Jenis Indikator Komposit IKK:

Tingkat Implementasi Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan

Realisasi Jenis Indikator Komposit IKK Tingkat Implementasi Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan adalah 100% dari target yang ditentukan, jenis indikator komposit IKK ini memiliki bobot 50% sehingga Capaian Kinerja jenis indikator IKK adalah sebesar 50% dengan uraian capaian berdasarkan Rincian Output sebagai berikut:

A. Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki satu Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan. Paket Kegiatan yang menunjang target capaian Rincian Output yaitu Perencanaan dan Penganggaran Serta Identifikasi Potensi Investasi Pembiayaan Perumahan yang berhasil mencapai output 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dengan output yaitu:

- 1) Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran TA. 2023
- 2) Monitoring dan Kinerja Capaian Output Pelaksanaan Anggaran TA. 2023
- 3) Laporan Berkala melalui Rapat Pimpinan Eselon II
- 4) Perencanaan Kerja TA. 2024
- 5) Perencanaan Proyek KPBU Perumahan TA. 2024
- 6) Materi RPJPN 2025-2029 bidang Pembiayaan Perumahan

Kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Serta Identifikasi Potensi Investasi Pembiayaan Perumahan yaitu:

- 1) Dalam pelaksanaan Identifikasi Potensi Investasi Pembiayaan Perumahan, proses penyiapan Kebijakan, Program, dan *Pilot Project* menghadapi kendala yaitu pelaku pembangunan belum mampu membangun Rumah Sederhana Hijau, terbatasnya insentif bagi pelaku pembangunan, adanya tambahan biaya untuk perubahan desain dan spesifikasi rumah untuk menerapkan Bangunan Gedung Hijau (BGH), dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah untuk menerbitkan Sertifikat BGH (SBGH) sedangkan untuk sertifikat bangunan hijau lainnya seperti EDGE dan GreenShip dikenakan biaya.
- 2) Dalam pelaksanaan identifikasi proyek KPBU pada tahap perencanaan pada Proyek Rumah Susun Perkotaan di Surabaya menemui kendala yaitu keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyiapan KPBU.
- 3) Alokasi pagu anggaran Tahun 2024 yang direncanakan dan disusun pada Tahun 2023 tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran Dit.PPP.

Strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) *Quick Assessment* untuk menentukan kriteria proyek yang masuk *quick wins*
- 2) Klasifikasi proyek terhadap target 50.000 unit yang terdiri atas Rumah Baru Pengembang, Rumah Baru Swadaya, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh
- 3) Melakukan pemetaan lokasi proyek KPBU yang potensial
- 4) Alokasi pagu anggaran tahun 2024 yang direncanakan dan disusun pada tahun 2023 tidak sesuai dengan usulan kebutuhan anggaran Direktorat PPP
- 5) Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja TA 2023 sesuai dengan *timeline* berdasarkan kesepakatan bersama di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan pelaksanaan di Tahun Anggaran 2023, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2024
- 2) Identifikasi dukungan yang dibutuhkan pada masing – masing proyek
- 3) Penyiapan *platform blended financing* sebagai potensi sumber pendanaan perumahan hijau terjangkau
- 4) Pemutakhiran rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2024
- 5) Monitoring pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2024
- 6) Penyusunan Renstra Dit.PPP 2025-2029

Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 15%.

B. Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dengan satu Indikator Rincian Output Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan. Paket Kegiatan yang menunjang target capaian Rincian Output tersebut yaitu Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan yang dapat menghasilkan Rekomendasi Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Perumahan. Pada Tahun Anggaran 2023, tidak terdapat Paket Kegiatan yang dianggarkan pada DIPA terkait dengan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan, namun capaian kinerja Rincian Output Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan mencapai 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan yaitu Studi Pendahuluan Rusun Perkotaan Surabaya – Tambak.

Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 20%.

C. Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki satu Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan. Paket kegiatan yang menunjang target capaian Rincian Output yaitu Fasilitasi Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Rusun Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Surabaya. Keluaran yang dihasilkan adalah Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Rusun Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Surabaya. Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 35%.

Kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Rusun Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Surabaya yaitu:

- 1) Pembangunan rusun SKBG di atas tanah BMD memerlukan dukungan peraturan pemerintah daerah
- 2) Berdasarkan hasil sementara market assessment, maka daya jual apartemen di Surabaya masih rendah, tetapi daftar tunggu sewa rusun masih tinggi.

Strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pemerintah walikota untuk menerbitkan perwali terkait harga sewa BMD, harga jual Rusun Milik SKBG dan penerbitan SKBG
- 2) Finalisasi Kajian *Market Assessment*

Berdasarkan pelaksanaan di Tahun Anggaran 2023, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Surabaya untuk menyiapkan Peraturan Walikota terkait harga sewa BMD, harga jual Rusun Milik SKBG dan penerbitan SKBG dengan merujuk pada Surat Edaran yang diterbitkan Kementerian PUPR;
- 2) Mengusulkan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan kaji ulang Peraturan Walikota terkait harga sewa Rusun agar dapat menyesuaikan kebutuhan pasar sehingga dapat mengurangi daftar tunggu sewa rusun.

D. Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki 1 (satu) Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan. Paket kegiatan yang menunjang target capaian Rincian Output yaitu Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan dan Pengusahaan Jaminan Pemerintah Terhadap KPBU Perumahan. Keluaran yang dihasilkan oleh Paket kegiatan Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan yaitu Rekomendasi Kebijakan Usulan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Rusun Perkotaan Surabaya dan Rekomendasi Kebijakan Usulan Penjaminan Proyek KPBU Karawang Spuur. Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 20%.

Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan

Kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan adalah belum adanya regulasi lebih lanjut dari Pemerintah Daerah yang membahas kewenangan tugas dan SOP Penerbitan SKBG Sarusun di tingkat daerah

Strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja adalah koordinasi dengan Dirjen Perumahan untuk melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang akan menyusun peraturan pelaksanaan di daerah terkait Penerbitan SKBG Sarusun

Berdasarkan pelaksanaan di Tahun Anggaran 2023, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait regulasi dalam hal implementasi SKBG.

Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan

Kendala yang dihadapi saat melakukan kegiatan Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan adalah:

- 1) Penyesuaian timeline pelaksanaan fasilitas PDF
- 2) Penyempurnaan Dokumen FBC

Strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja adalah penyempurnaan kajian dokumen Final Business Case (FBC) untuk dapat dikirimkan ke BUPI/PT. PII agar didapatkan Surat Pertimbangan Minat Penjaminan.

Berdasarkan pelaksanaan di Tahun Anggaran 2023, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 adalah akan dilakukan koordinasi intensif dengan PT PII dalam perolehan Surat Pertimbangan Minat Penjaminan dan akan melakukan pengajuan Usulan Penjaminan setelah finalisasi FBC pada bulan Januari 2024.

Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 20%

E. NSPK Pembiayaan Perumahan

Rincian Output NSPK Pembiayaan Perumahan memiliki 1 (satu) indikator Rincian Output yaitu Jumlah Penyusunan NSPK Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan. Paket kegiatan yang menunjang target capaian Rincian Output Pedoman/prototype Rumah Sederhana Hijau untuk Bangunan Klas 1a. Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 10%.

Kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan Penyusunan NSPK KPBU Perumahan:

- 1) Penerbitan SE DJCK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja BGH Klas 1A pada pertengahan tahun 2023.
- 2) Proses piloting sertifikasi BGH Klas 1A berjalan secara manual dan memakan waktu.

Strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja adalah Finalisasi desain prototype RSH dengan TA BGH berdasarkan piloting BGH Klas 1A di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan pelaksanaan di Tahun Anggaran 2023, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 adalah:

- 1) Konsultasi public desain prototype RSH kepada Pengembang Rumah Subsidi.
- 2) Legalisasi desain prototype RSH melalui SE Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan

Realisasi Jenis Indikator Komposit IKK Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan adalah 100% dari target yang ditentukan, jenis indikator komposit IKK ini memiliki bobot 50% sehingga Capaian Kinerja jenis indikator IKK adalah sebesar 50% dengan uraian capaian berdasarkan Rincian Output sebagai berikut:

F. Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan

Rincian Output Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan memiliki 2 (dua) indikator rincian output yaitu Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) dokumen dan Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) kesepakatan. Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan terdiri atas 2 (dua) paket kegiatan yaitu Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan dan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Perumahan.

Indikator Rincian Output dan Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan terdiri atas Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan memiliki target 2 (dua) kesepakatan Proyek KPBU Bidang Perumahan Berdasarkan target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024. Khusus pada Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan terdiri atas Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan dalam perhitungan targetnya akan menggunakan jumlah kesepakatan berdasarkan DIPA Revisi 09.

Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan

Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan berhasil mencapai 3 (tiga) dokumen keluaran yaitu Konsep akhir Dokumen FBC Proyek KPBU Rusun Cisaranten, Konsep Akhir Dokumen Pengadaan Proyek KPBU Rusun Cisaranten, dan Laporan Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan TA 2023.

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan dukungan dan penyiapan transaksi pembiayaan perumahan diantaranya:

- 1) Pelaksanaan Pendampingan PDF dari Kementerian Keuangan yang dibantu oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII) dalam penyusunan FBC;
- 2) Pelaksanaan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kota Bandung dalam penyelesaian isu strategis KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung;
- 3) PJPk telah mengambil Keputusan dan komitmen yang dipersyaratkan dengan tepat.

Strategi tercapainya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim KPBU melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 16 Tahun 2022;
- 2) Berkoordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait khususnya Pemerintah Kota Bandung.

Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan

Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan dapat mencapai 2 (dua) Kesepakatan dari 4 (empat) Kesepakatan target Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan berdasarkan DIPA. Adapun 2 (dua) kesepakatan tersebut yaitu Proyek KPBU Rusun Hankam WPI A (60 Tower) dan Proyek KPBU Rusun Nort Government WP IA (6 Tower).

Proses realisasi Kesepakatan pada Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan lainnya masih dalam diskusi dan arahan Pimpinan untuk melakukan penyesuaian pada masa kerjasama (konsesi) proyek dan penyesuaian *financial model*. Walaupun belum adanya proyek yang dilakukan pengumuman PQ di Tahun 2023 namun Dit.PPP telah menyiapkan:

1. Dokumen PKS Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten
2. Nota Kesepakatan antara Kementerian PUPR dengan Pemkot Bandung tentang sinergi dan dukungan dalam pembangunan Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
3. Laporan Pendampingan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan

Kendala yang dihadapi dalam memperoleh 2 (dua) kesepakatan proyek KPBU yang siap dikerjasamakan Tahun 2023 pada Proyek KPBU Rusun Hankam WPI A (60 Tower) dan Proyek KPBU Rusun Nort Government WP IA (6 Tower) adalah adanya Surat Menteri PUPR No.PR 0102-Mn/343 tanggal 14 Februari 2023 perihal pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berisi bahwa Kementerian PUPR TA 2023 akan lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui sumber pembiayaan APBN dan untuk penyelenggaraan KPBU agar dapat dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Strategi yang dilakukan dalam memperoleh 2 (dua) kesepakatan proyek KPBU yang siap dikerjamakan pada Proyek KPBU Rusun Hankam WPI A (60 Tower) dan Proyek KPBU Rusun Nort Government WP IA (6 Tower).

1. Penyerahan Studi Kelayakan Proyek KPBU Rusun Hankam WPIA dan Rusun ASN WP1B KIPP IKN Atas Prakarsa Konsorsium Nusantara kepada Bapak Menteri PUPR sesuai Surat Nomor 04.036/KONS/VI/2023 pada tanggal 27 Juni 2023.

FS dan Dokumen Pendukung yang diusulkan oleh Konsorsium Nusantara telah disetujui oleh Menteri PUPR untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya oleh Otorita IKN sesuai Surat Menteri PUPR Nomor RU 0203-Mn/2621 dan 2622, Lingkup yang disetujui hanya 60 Tower Rusun Hankam di WPIA KIPP.

2. Penyampaian Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Dokumen Kelengkapan Pengajuan Prakarsa Proyek KPBU Pembangunan Hunian ASN IKN WPIA dari PT Summarecon Agung, Tbk. (Summarecon) kepada Bapak Menteri PUPR sesuai Surat dari Summarecon Nomor 0008/VI/DIR/SMRA/23 pada tanggal 19 Juni 2023.

FS dan Dokumen Pendukung yang diusulkan oleh Summarecon tidak dapat disetujui mempertimbangkan Usulan Biaya Satuan Konstruksi Gedung dari Summarecon melebihi ketentuan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sesuai PPI 6/2021.

Tindak lanjut pelaksanaan pendampingan dan transaksi pembiayaan perumahan ini akan dilakukan pelaksanaan lelang Proyek KPBU Bidang Perumahan Tahun 2024 sesuai pada proyek yang ditetapkan dan akan mendukung OIKN dalam menyiapkan dokumen pendukung pengajuan FPP, konfirmasi AP dan Permohonan Dukungan Pemerintah lainnya ke Menkeu.

G. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki 1 (satu) indikator Rincian Output yaitu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Laporan. Paket kegiatan yang menunjang target capaian Rincian Output yaitu Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan, dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan. Berdasarkan keluaran tersebut Dit.PPP berhasil menghasilkan Rincian Output di atas target sebanyak 6 (enam) Laporan yang terdiri dari:

- 1) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan Tahap Perencanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
- 2) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan Tahap Penyiapan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
- 3) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan Tahap Transaksi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
- 4) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan
- 5) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan
- 6) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan

Berdasarkan keluaran tersebut capaian yang diperoleh adalah 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output memperoleh capaian kinerja sebesar 45%.

Kendala yang dihadapi saat Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan yaitu terkait dengan ranah pada konsep Pedoman Pemantauan dan Evaluasi KPBU Sektor Perumahan masih terlalu umum dan tidak dapat dikendalikan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, sehingga lingkup Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan diperkecil dengan cakupan menjadi di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Selain itu isu perubahan peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan KPBU juga menjadi salah satu kendala dalam rencana penerbitan Pedoman Monev.

Strategi untuk mencapai output adalah dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi KPBU.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan berdasarkan pada Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang perumahan Tahap Perencanaan, Tahap Penyiapan, dan Tahap Transaksi.

H. Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Rincian output Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan memiliki 1 (satu) indikator Rincian Output yaitu Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Laporan dengan keluaran yaitu Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2023.

Tindak lanjut setelah penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2023 adalah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 20%.

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dihasilkan berdasarkan rincian capaian dari output paket sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Rincian Capaian Kinerja SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman, yang Layak, Aman, dan Terjangkau							
Sasaran Program: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman							
IKSP: Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan							
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan							
IKK: Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan							
Target				Capaian			
50,00%				106,07%			
No	Jenis Indikator Komposit IKK / KRO / RO / Indikator RO / Paket Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Bobot (%)	Capaian (%)
	Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera	%	100%	87,82%	87,82%	30%	26,35%
	I. Koordinasi	%	100%	87,82%	87,82%	30%	71,55%
A	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	100%	71,25%
I	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (SMF)	%	100%	100%	100%	70%	70%
a	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan Sekunder dan Tapera (PT.SMF)	Rumah Tangga	10.000	333.988	100%	100%	100%
2	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (Tapera)	%	100%	17,82%	17,82%	30%	17,82%
a	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan Sekunder dan Tapera (Tapera)	Rumah Tangga	12.072	7.249	17,82%	30%	17,82%
	Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100%	104%	62,45%	50%	51,23%
	I. Subsidi kepada Keluarga	%	100%	104%	62,45%	100%	102,45%
B	Fasilitas Penyaluran FLPP	%	100%	104%	62,45%	60%	62,45%
I	Jumlah Penyaluran FLPP	%	100%	104%	62,45%	100%	104%
a	Penyaluran FLPP	Rumah Tangga	220.000	229.000	62,45%	100%	104%
C	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	%	100%	100%	100%	40%	40%
I	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Bantuan Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM)	%	100%	100%	100%	40%	40%
a	Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	Rumah Tangga	220.000	220.000	100%	100%	100%
D	Bantuan Biaya Administrasi	%	100%	100%	100%	40%	40%

I	Jumlah Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi	%	100%	100%	100%	40%	40%
a	Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA)	%	13.993	13.160	93,81%	100%	93,81%
Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan		%	100%	142,50%	142,50%	20%	28,50%
II. Kebijakan Sarana dan Prasarana		%	100%	150%	150%	50%	75%
E	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100%	150%	150%	50%	75%
I	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	4	100%	50%	75%
a	Kajian Pembiayaan Perolehan Sarusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
b	Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Pembangunan / Perbaikan Rumah Swadaya bagi MBR	Rekomendasi Kebijakan	1	3	100%	100%	100%
2	Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100%	30%	30%
a	Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
b	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	20%	20%
a	Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
III. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		%	100%	150%	150%	20%	30,00%
E	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
I	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	2	3	100%	100%	100%
a	Pengembangan Skema dan Mekanisme Pembiayaan Perolehan Sarusun dengan Sewa Beli	NSPK	1	1	100%	100%	100%
b	Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	100%	100%	100%
c	Penyusunan Tata Laksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM	NSPK	1	1	100%	100%	100%
IV. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		%	100%	150%	150%	15%	22,50%
F	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	%	100%	150%	150%	100%	150%
I	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	2	30	150%	100%	150%
a	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	Laporan	1	1	100%	100%	100%

b	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	Laporan	I	I	100%	100%	100%
c	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	Laporan	I	I	100%	100%	100%
d	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	Laporan	I	I	100%	100%	100%
e	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	Laporan	I	I	100%	100%	100%
f	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	Laporan	I	I	100%	100%	100%
V. Pelayanan Publik Lainnya		%	100%	100%	100%	10%	10,00%
G	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	%	100%	100%	100%	100%	100%
I	Jumlah Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	I	I	100%	100%	100%
a	Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Layanan	I	I	100%	100%	100%
VI. Subsidi Kepada Keluarga		%	100%	100%	100%	5%	5,00%
H	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	%	100%	100%	100%	100%	100%
I	Jumlah Pendampingan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Pendampingan	I	I	100%	100%	100%
a	Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan PHLN (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)	Pendampingan	I	I	100%	100%	100%
SK: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan			100%	100%	100%	100%	106,07%

Berikut adalah uraian capaian kinerja Sasaran Kegiatan meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Jenis Indikator Komposit IKK:

Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera

Realisasi Jenis Indikator Komposit IKK Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera adalah 87,82% dari target 100%. Jenis indikator ini memiliki bobot sebesar 30%, sehingga Capaian Kinerja Jenis Indikator IKK adalah sebesar 26,35% dengan uraian capaian berdasarkan Rincian Output sebagai berikut:

A. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Fasilitasi Pembiayaan Perumahan memiliki 2 (dua) Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (SMF) dengan target penyaluran kepada 10.000 Rumah Tangga dan Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Tapera) dengan target penyaluran kepada 12.072 Rumah Tangga (Surat Menteri Keuangan S-13/ML.05/2023 terkait RKAT BP Tapera 2023).

Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (SMF)

Berdasarkan penyampaian informasi pada Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja TA 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tanggal 21 Desember 2023, PT. SMF (Persero) telah merealisasikan penyaluran dengan memfasilitasi pembiayaan perumahan kepada 333.988 debitur / rumah, dengan rincian Realisasi Pinjaman di Luar FLPP periode Tahun 2023. Tingginya NoA (*Number of Account*) merupakan dampak dari masifnya penyaluran pembiayaan mikro perumahan sebagai bagian dari implementasi perluasan mandat Perpres Nomor 100 Tahun 2020.

Tabel 4. 5 Rincian Penyaluran Fasilitas Pembiayaan PT. SMF (Persero) Tahun 2020-2023 dan Perbandingan target dan realisasi

	2020		2021		2022		2023		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan	Target s.d. Desember	Realisasi*
Jumlah Debitur/NoA	8.460	8.460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	333.988

Berikut merupakan tabel rincian penyaluran fasilitas pembiayaan PT SMF dari 4 tahun terakhir dengan sajian data mengklasifikasikan tanpa mikro dan mikro perumahan. Terdapat peningkatan realisasi dari tahun ke tahun dari tahun 2020 hingga 2023. Pada Realisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan oleh PT. SMF (Persero) selalu memperoleh capaian di atas Rincian Output berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan perbandingan realisasi dan target penyaluran yang berhasil dilakukan oleh PT. SMF (Persero) pada Tahun Anggaran 2023 adalah 3.340% dari target, namun dalam perhitungan *cascading*, capaian kinerja Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan oleh PT. SMF (Persero) dinilai sebesar 100%. Indikator Rincian Output Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (SMF) memiliki bobot sebesar 70% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 70%.

Strategi Pelaksanaan target penyaluran pinjaman pada Tahun 2023 yang dilakukan oleh PT. SMF (Persero) sebagai berikut:

- 1) Mendorong pemerintah mengimplementasikan regulasi bagi perbankan agar wajib menggunakan dana jangka panjang untuk pembiayaan jangka panjang
- 2) Menciptakan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mitra Lembaga keuangan
- 3) Percepatan *closing* transaksi sesuai *pipeline* pembiayaan.

Tindakan lanjut yang dilakukan pada Tahun 2024 adalah

- 1) Benchmarking skema pembiayaan yang diterima mitra dari counterpart lain (rate, covenant, terms&conditions) sebagai dasar penentuan strategi pemasaran serta eksplorasi sumber pendanaan
- 2) Mempertimbangkan dengan matang situasi prediksi ke depan dalam penetapan prognosa target

Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (Tapera)

Berdasarkan penyampaian informasi pada Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja TA 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tanggal 21 Desember 2023. BP Tapera telah merealisasikan penerbitan efek dari penyaluran pembiayaan perumahan pada Tahun 2023 sebanyak 7.172 unit atau dengan nilai Rp 1.032.485.520.685 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Rincian Penerbitan Efek Pembiayaan Tapera Tahun 2023

Nama Bank	Unit	Rupiah
BTN	4.495	Rp 681.426.576.172
BTN Syariah	1.989	Rp 267.592.138.021
BRI	514	Rp 59.485.072.875
BJB	140	Rp 20.222.996.117
BSI	34	Rp 3.758.737.500
Total	7.172	Rp 1.032.485.520.685

Berdasarkan informasi dari Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tanggal 29 Desember 2023 disampaikan data realisasi capaian BP Tapera penerbitan efek dari penyaluran pembiayaan perumahan pada Tahun 2023 sebanyak 7.249 unit atau dengan nilai Rp 1.042.845.955.685.

NO.	NAMA BANK	DATA AKAD 27 DES 2023	DATA CAIR EFEK 29 DES 2023		TOTAL EFEK CAIR 29 DES 2023		SISA AKAD 2023 YANG BELUM CAIR
			AKAD 2022	AKAD 2023	UNIT	RUPIAH	
1	BANK BTN	4.457	429	4.066	4.495	681.426.576.172	391
2	BANK BRI	874	229	285	514	59.485.072.875	589
3	BANK BJB	140	42	128	170	24.785.181.117	12
4	BANK NTT	11			-		11
5	BANK KALSEL	11		10	10	1.258.012.500	1
6	BANK BNI	3			-		3
7	BANK MANDIRI	9			-		9
8	BANK BTN SYARIAH	1.230	835	1154	1.989	267.592.138.021	76
9	BANK BSI	117	12	22	34	3.758.737.500	95
10	BANK KALSEL SYARIAH	41		37	37	4.540.237.500	4
11	BANK NTB SYARIAH	12			-		12
TOTAL		6.905	1.547	5.702	7.249	1.042.845.955.685	1.203

Gambar 4. 1 Realisasi Efek BP Tapera Per tanggal 29 Desember 2023

Pada perbandingan realisasi terhadap target penyaluran Pembiayaan Tapera, BP Tapera berhasil merealisasikan sebanyak 59,41% dari target sebesar 12.072 debitor rumah tangga dengan target yang mengacu pada surat Kementerian Keuangan No.S-13/MK.05/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang panyampaian pengesahan atas RKAT BP Tapera TA 2023. Indikator Rincian Output Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (Tapera) memiliki bobot perhitungan sebesar 30%, sehingga capaian kinerja Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (Tapera) adalah sebesar 17,82%.

Tantangan yang dihadapi saat melakukan penyaluran Pembiayaan Tapera adalah adanya hambatan-hambatan dari bank penyalur (seperti kesiapan organisasi). Pada Evaluasi Kinerja Q3 Tahun 2023 tantangan lain yang dihadapi BP Tapera adalah Ketersediaan jumlah unit rumah ready stock juga terbatas karena adanya isu kenaikan harga jual dan banyaknya jumlah angsuran yang harus dibayar, menyebabkan kemampuan bayar PNS atas kredit baru menjadi sulit.

Strategi yang dilakukan oleh BP Tapera untuk memperoleh realisasi dalam penyaluran pembiayaan Tapera melalui pemecahan Solusi dengan pendekatan-pendekatan yang membuat Bank Penyalur memiliki kesiapan dalam penyaluran sebagai contoh pelaksanaan FGD dan juga training tata cara penyaluran untuk melakukan percepatan realisasi kinerja di Tahun 2023. Strategi lainnya yang membuat keberhasilan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian target seluruh bank penyalur, melakukan followup bersama bank penyalur terkait data minat pada aplikasi Sikasep dan Sitara.

Tindaklanjut yang disiapkan untuk tahun 2024 oleh BP Tapera diantaranya memberikan sosialisasi dan edukasi bagi stakeholder perumahan (instansi dan calon debitur), memberikan reward & punishment kepada bank penyalur atas evaluasi kinerja penyaluran yang telah dilakukan, dan memastikan seluruh bank penyalur memiliki potensi developer kelolaan yang dapat melakukan akad dengan tepat waktu dan rumah terbangun 100%.

Dit PPP juga telah terlibat dan turut mendukung kinerja dari BP Tapera melalui:

- 1) Pembahasan RKAT BP Tapera Tahun 2023 dan Tahun 2024
- 2) Pemilihan Calon Komisiner dan Deputy Komisiner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
- 3) Penyusunan RPP tentang Perubahan atas PP 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera

Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan

Realisasi Jenis Indikator Komposit IKK Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah 104% dari target 100%. Jenis indikator ini memiliki bobot sebesar 50%, sehingga Capaian Kinerja Jenis Indikator IKK adalah sebesar 51,23% dengan uraian capaian berdasarkan Rincian Output adalah sebagai berikut:

B. Fasilitas penyaluran FLPP

Rincian Output Fasilitas Penyaluran FLPP memiliki 1 (satu) Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Pelaksanaan Penyaluran FLPP dengan target penyaluran berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 sebanyak 220.000 rumah tangga.

Realisasi penyaluran FLPP tahun 2023 sebanyak 229.000 rumah tangga dengan nilai rupiah Rp26.320.045.507.031 capaian ini di atas target 220.000 rumah tangga dengan persentase 104% dari target penyaluran sesuai renstra. Rincian Output pada fasilitas penyaluran FLPP memiliki bobot 40% sehingga capaian kinerja yang Rincian Output yang diperoleh adalah 62,45%.

Program FLPP memiliki minat yang cukup tinggi dari masyarakat dikarenakan rendahnya tingkat bunga KPR sebesar 5%, jumlah tenor yang panjang sampai dengan 20 tahun, dan memperoleh tambahan fasilitas subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4.000.000.

Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari kecermatan dalam melakukan strategi optimalisasi pemanfaatan dana FLPP. Adapun keberhasilan ini disebabkan realisasi nilai anggaran penyaluran dana FLPP melebihi target dikarenakan realisasi pengembalian pokok FLPP melebihi target.

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Pada Tahun 2023 Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tidak memiliki target capaian berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 sebanyak 220.000 rumah tangga. Meskipun tidak ada penyaluran atas program tersebut di Tahun 2023 dikarenakan *loan agreement* berakhir pada Februari 2023, namun pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap kualitas konstruksi bangunan rumah dan keterhunian rumah akad kredit Tahun 2022 tetap dilakukan pada tahun anggaran 2023.

Sebagai informasi Capaian kinerja, BP2BT berhasil melakukan realisasi secara akumulasi dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 mampu sebanyak 30.422 unit dengan profil pekerja penerima manfaat BP2BT mayoritas dari kalangan Wiraswasta 58,95% dan swasta 36,14% dengan sisanya berasal dari PNS serta TNI/Polri.

C. Fasilitas Subsidi Bunga dan Bantuan Uang Muka

Rincian Output Fasilitas Subsidi Bunga dan Bantuan Uang Muka memiliki 1 (satu) Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Bantuan Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM) yang terdiri atas Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan target penyaluran berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 sebanyak 220.000 rumah tangga.

Realisasi penyaluran SBUM berhasil disalurkan kepada 220.000 rumah tangga atau sebanyak Rp 895.000.000.000. Penyaluran tersebut mencapai 100% dari target yang ditetapkan di dalam Renstra. Penyaluran Subsidi Selsih Bunga / Selisih Margin (SSB/SSM) yang menggulung pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak Rp 3.457.520.000.000 atau kepada 750.497 rumah tangga.

Tabel 4. 7 Pelaksanaan Penyaluran SBUM dan SSB

	Unit	Nilai Subsidi	% Unit	% Rupiah
SBK	750.497 Unit	Rp 3.457.520.000.000	99,54%	100%
SBUM	220.000 Unit	Rp 895.000.000.000	100%	100%
TOTAL	970.497 Unit	Rp 4.352.520.000.000	99,64%	100%

Rincian Output Fasilitas Subsidi Bunga dan Bantuan Uang Muka memiliki bobot sebesar 40% sehingga berdasarkan realisasi penyaluran SBUM sebesar 100% dapat membuat capaian kinerja Rincian Output menjadi sebesar 40%.

Tantangan yang dihadapi dan strategi saat penyaluran SSB / SSM adalah perbedaan suku bunga acuan yang digunakan saat penganggaran dengan realisasi (suku bunga saat penganggaran 10,1%, suku bunga realisasi rata-rata hingga agustus 11,51%). DIPA saat ini hanya dapat membayar SBK full sampai tagihan Oktober 2023, sehingga ada potensi kekurangan anggaran DIPA. 2023. Strategi yang dilakukan dalam menghadapi keterbatasan anggaran SBK dan kenaikan suku bunga yaitu dengan mengalihkan pembayarannya ke tahun 2024 setelah melalui audit BPK.

Tantangan yang dihadapi dan strategi saat penyaluran SBUM adalah peningkatan target FLPP 2023 yang semula 220.000 unit menjadi 229.000 unit tidak dapat dipenuhi di tahun 2023 sehingga kelebihan penagihan sebesar 8.910 unit tidak dapat dibayarkan SBUM nya di tahun 2023. Strategi yang dilakukan adalah melalui pengalihan kurang bayar/kelebihan penagihan tersebut pada Tahun 2024.

Tindaklanjut yang telah disiapkan dan pelaksanaan nya sedang berjalan dari Tahun 2023 adalah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersama dengan BP Tapera sedang mengembangkan fitur integrasi antara FLPP dan SBUM, sehingga ketika dana FLPP cair, terdapat notifikasi ke aplikasi SISIBUM. Adapun pengintegrasian ini menggunakan sistem e-FLPP 2.0 yang terus dioptimalkan penggunaannya oleh para bank penyalur di Tahun 2024.

D. Fasilitas Bantuan Biaya Administrasi

Bantuan Biaya Administrasi (BBA) merupakan Bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan sebagian atau seluruh biaya administrasi pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. Rincian Output BBA tidak terdapat pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 namun Dit.PPP telah berhasil melakukan inovasi dengan melaksanakan penyaluran program Bantuan Biaya Administrasi yang tatacaranya berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.11 Tahun 2023 tentang Bantuan biaya administrai pemilik rumah bagi MBR.

Tabel 4. 8 Progres Kinerja BBA Tahun 2023

No	Bank Pelaksana/Penyalur	Prognosa Bank (tanggal akad) TA 2023				Status eFLPP			Permintaan Pembayaran BBA Bank Pelaksana			Nilai Permintaan Pembayaran BBA yang disetujui (sudah proses pengujian oleh Satker)	
		13-30 Nov	1-10 Des	10-31 Des	Total Prognosa Bank	Jumlah Akad 13 Nov - 10 Des 2023	Upload Dokumen BBA	Upload G-Drive (BTN)					
		Unit				Unit			Unit	%	Rp	Rp	%
1	BANK BTN	10.000	14.330	1.500	25.830	15.222	10.798	460	11.264	80,50	46.094.309.497	44.939.553.897	80,29
2	BTN SYARIAH	1.900	-	200	2.100	2.860	1.820	-	1.814	12,96	7.249.461.250	7.249.461.250	12,95
3	BANK BRI	1.164	20	80	1.264	1.032	-	-	-	-	-	-	-
4	BANK BSI	370	60	20	450	342	-	-	-	-	-	-	-
5	BANK MANDIRI	326	40	-	366	266	-	-	-	-	-	-	-
6	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN	195	10	-	205	233	-	-	-	-	-	-	-
8	Bank NTB	10	-	5	15	65	59	-	59	0,42	240.200.000	236.000.000	0,42
7	BPD KALIMANTAN SELATAN SYARIAH	10	5	5	20	-	13	-	13	0,09	52.000.000	52.000.000	0,09
9	BPD YOGYA	6	-	-	6	6	6	-	6	0,04	20.340.000	20.340.000	0,04
10	Bank SUMSEL BABEL	5	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bank SUMSEL BABEL SYARIAH	5	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BPD KALSEL	2	2	-	4	-	4	-	4	0,03	17.440.000	16.000.000	0,03
13	BANK BNI	-	-	10	10	15	-	-	-	-	-	-	-
14	Bank PAPUA	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		13.993	14.477	1.830	30.300	20.041	12.700	460	13.160	94,05	53.673.750.747	52.513.355.147	93,82

a. Prognosa Akad Bank TA 2023	30.300	Rp	121.200.000.000
b. Target BBA yang akan di tagihkan pada TA 2023 (akad 13-30 Nov) (DIPA)	13.993	Rp	55.972.000.000
c. Permintaan Pembayaran BBA Bank Pelaksana 2023 (disetujui)	13.160	Rp	52.513.355.147
d. Potensi Sisa Anggaran BBA TA 2023 berdasarkan Target pada huruf b (b-c)	833	Rp	3.458.644.853
e. Perkiraan Permintaan BBA akad 2023 yang akan di tagihkan pada TA 2024	17.140	Rp	68.560.000.000

Capaian Realisasi BBA berdasarkan DIPA 93,81% atau Senilai Rp52.513.355.147

Realisasi capaian penyaluran program BBA Tahun 2023 sebanyak 13.160 atau 93,81% dengan nilai rupiah sebesar Rp 52.513.355.147 rumah tangga. Adapun target DIPA pada BBA adalah 13.993 rumah tangga atau Rp 55.972.000.000.

Kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program BBA (Bantuan Biaya Administrasi) Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah waktu penyaluran yang singkat, keterbatasan jumlah anggaran dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal.

Startegi yang telah dilakukan dalam memperoleh keberhasilan dalam penyaluran BBA yaitu koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait penyaluran BBA TA 2023 yang dilakukan pada TA 2024, melakukan pengajuan dispensasi dalam penyampaian SPM lewat batas waktu, dan percepatan pelaksanaan PKS antara Satker dan Bank Pelaksana dalam penyaluran BBA TA 2023.

Tindaklanjut yang dilakukan dalam penyaluran Program BBA meliputi PKS penyaluran BBA TA 2024 dengan Bank Pelaksana, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder, penyempurnaan dan pemanfaatan sistem aplikasi dalam penyaluran BBA TA 2023.

Tingkat Implementasi Penyusunan Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Realisasi Jenis Indikator Komposit IKK Tingkat Implementasi Penyusunan Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah 150% dari target 100%. Jenis indikator ini memiliki bobot sebesar 20%, sehingga Capaian Kinerja Jenis Indikator IKK adalah sebesar 28,50% dengan uraian capaian berdasarkan Rincian Output adalah sebagai berikut:

E. Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Rincian Output Fasilitas Pembiayaan Perumahan memiliki 3 (tiga) Indikator Rincian Output yaitu Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) rekomendasi kebijakan yaitu Kajian Pembiayaan Perolehan Sarusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Pembangunan / Perbaikan Rumah Swadaya bagi MBR

Rincian Output Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) rekomendasi kebijakan yaitu Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan dan Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Pembangunan / Perbaikan Rumah Swadaya bagi MBR.

Rincian output Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) rekomendasi kebijakan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan Pemangku Kepentingan.

Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Paket kegiatan pada rincian output Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan yaitu pada output Kajian Pembiayaan Perolehan Sarusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Usulan Skema Pembiayaan Perolehan Sarusunami bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada paket kegiatan pada rincian output Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Pembangunan / Perbaikan Rumah Swadaya bagi MBR yaitu:

- 1) KepmenPUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya (11 Januari 2023);
- 2) KepmenPUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (23 Januari 2023);
- 3) Surat Edaran Nomor: 06/SE/Dp/2023 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Memperoleh Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan
- 4) PermenPUPR Nomor 11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi MBR (10 November 2023)

Penyebab Keberhasilan:

- 1) Telah disampaikan kepada Biro Hukum Sekjen Kementerian PUPR untuk proses legalisasi
- 2) Saat ini rumusan telah diterbitkan menjadi regulasi

Strategi yang dilakukan untuk memperoleh keberhasilan yaitu dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait skema kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Tindak lanjut yang telah dipersiapkan adalah melakukan Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR

Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Paket kegiatan pada Rincian output pada Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yaitu Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan dan Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan

Output pada penyiapan kerja sama pembiayaan perumahan adalah Draft Perjanjian Kerja Sama 4 pihak (DJPI, BP Tapera, Asosiasi, Bank Pelaksana) tentang Pemenuhan Kualitas Rumah yang Difasilitasi oleh Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan serta Tabungan Perumahan Rakyat (tidak lanjut) dan Perjanjian Kerja Sama antara SatkerPI dan Bank Pelaksana tentang Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2023.

Output pada Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan adalah Kesepakatan Bersama dengan Bank Riau Kepri Syariah tentang Penyaluran Dana Subsidi Bantuan Uang Muka, Kesepakatan Bersama dengan PT Zerone Indonesia tentang Penggunaan Aplikasi Pendukung dan Panduan Implementasi Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau Klas IA dalam Program Pembangunan Perumahan yang Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan. Adapun kendala yang dihadapi Pembahasan substansi Kesepakatan Bersama dimana Kesepakatan Bersama Antara Kementerian PUPR dan PT. Zerone dimana garis besarnya adalah penggunaan aplikasi yang dikembangkan PT. Zerone guna mendukung dan Panduan Implementasi Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau Klas IA dalam Program Pembangunan Perumahan yang Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan

Penyebab Keberhasilan pada paket kegiatan tersebut adalah asosiasi pengembang bersedia melakukan penandatanganan kerjasama setelah penyesuaian harga jumlah rumah dan asosiasi telah menyampaikan masukan final pada PKS.

Strategi yang dilakukan untuk menghadapi hal tersebut:

- 1) Percepatan dalam pembahasan penyesuaian harga jual rumah subsidi Tahun 2023 dengan melibatkan Asosiasi Pengembang, BPS, CK, Kemenkeu dan BP Tapera
- 2) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan
- 3) Komunikasi intens dan komperhensif serta Pembahasan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian PUPR dan PT. Zerone

Tindak lanjut yang dipersiapkan:

- 1) Finalisasi Draft Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Kualitas Rumah yang Difasilitasi Oleh Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Serta Tabungan Perumahan Rakyat; dan
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Paket kegiatan pada Rincian output pada Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan. Adapun targetnya ialah 1 rekomendasi kebijakan dengan output/keluaran Laporan Koordinasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan (Kualitas Konstruksi rumah).

Penyebab keberhasilan pada output/keluaran kegiatan tersebut adalah Secara aktif Berkoordinasi dengan BP Tapera dan Bank Pelaksana dalam Pelaksanaan Program-Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Tindak lanjut yang dipersiapkan adalah Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan program pembiayaan perumahan yang melibatkan pemangku kepentingan,

F. NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan

Rincian Output NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan memiliki indikator rincian output yaitu Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan dengan keluaran paket kegiatan Pengembangan Skema dan Mekanisme Pembiayaan Perolehan Sarusun dengan Sewa Beli, Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan Penyusunan Tata Laksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM.

Rincian Output berhasil merealisasikan 3 (tiga) Rekomendasi Kebijakan dari target 2 (dua) output rekomendasi berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024, yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian Output sehingga capaian kinerja sebesar 30%.

Paket kegiatan NSPK Pengembangan Skema Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan memiliki tantangan belum adanya proyek rusun SKBG dalam waktu dekat dan pilot project pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM dalam penyusunannya belum memiliki pengalaman.

Strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan dan memperoleh keberhasilan adalah Sosialisasi dengan Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten agar berminat membangun SKBG dan mendorong adanya *pilot project*, berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyelenggaraan rusun sewa/milik, dan percepatan pemenuhan dokumen 6 (enam) area perubahan oleh Tim Kerja Pembangunan ZI.

Adapun tindak lanjut yang telah dipersiapkan:

- 1) pembahasan dengan melibatkan ATR/BPN, Bank BTN, dan Pemprov DKI Jakarta
- 2) penyempurnaan Pengembangan Skema dan Mekanisme Pembiayaan Perolehan Sarusun dengan Sewa Beli
- 3) Finalisasi Perubahan SE Dirjen PI No. 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
- 4) Penyusunan Tata Laksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM

G. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Rincian output pada Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan memiliki indikator Rincian Output yaitu Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan. Adapun Rincian output ini memiliki 2 (dua) target laporan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 dan pada DIPA Revisi ke-09 memiliki target 30 (tiga puluh) laporan. Dit.PPP berhasil mencapai realisasi laporan berdasarkan jumlah yang telah ditargetkan pada DIPA, yaitu 30 (tiga puluh) sehingga jika dikonversikan memperoleh capaian rincian output sebesar 22,50% dari bobot indikator 15%.

Tabel 4. 9 Rincian Realisasi Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Paket Kegiatan	Output Laporan	Jumlah	Satuan
Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	Laporan Konsolidasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Wilayah I (Pulau Sumatera)	1	Laporan
Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	Laporan Konsolidasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Wilayah 2 (Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT)	1	Laporan
Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	Laporan Konsolidasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Wilayah 3 (Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua)	1	Laporan
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Wilayah I (Pulau Sumatera)	9	Laporan
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Wilayah 2 (Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT)	9	Laporan

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Wilayah 3 (Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua)	9	Laporan
--	---	---	---------

Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1, 2, dan 3

Pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1, 2, dan 3 berhasil menghasilkan output 3 (tiga) Laporan hasil Pemantauan dan evaluasi dengan penyebab keberhasilan telah dilakukannya pelaksanaan monev sesuai wilayah dan diselesaikan laporan yang tepat waktu. Adapun strategi yang telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan stakeholder dalam rangka pemantauan dan evaluasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, melakukan rapat evaluasi kinerja kaurtalan dan semesteran.

Tindak lanjut yang telah dipersiapkan yaitu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan mengacu Juknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1, 2, dan 3

Pada kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah memiliki target 3 (tiga) laporan dengan keluaran laporan berdasarkan wilayah. Dit.PPP berhasil menyelesaikan 27 (dua puluh tujuh) laporan dengan setiap wilayah menghasilkan 9 (sembilan) laporan. Pembagian 3 (tiga) wilayah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yaitu Wilayah I meliputi provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Wilayah II meliputi provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada Wilayah III meliputi provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada kegiatan ini adalah Koordinasi dengan Bank Pelaksana, Pengembang, BP Tapera, Satker DJPI, Satker PI dan perbantuan tenaga surveyor. Strategi yang dilakukan agar tercapainya kegiatan tersebut yaitu Telah dilaksanakan kegiatan monev tinjauan fisik di Wilayah 1, 2, dan 3. Adapun tindak lanjut yang telah dipersiapkan adalah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1, 2, dan 3 dengan mengacu Juknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

H. Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka

Rincian output Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka memiliki 1 (satu) indikator rincian output yaitu Jumlah Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka dengan terdiri atas kegiatan Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

Kegiatan Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan memiliki target berupa layanan. Dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyaluran dana subsidi bunga kredit serta subsidi bantuan uang muka.

I. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Rincian output Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan memiliki 1 (satu) indikator rincian output yaitu Jumlah Pendampingan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dengan target kegiatan pendampingan yaitu Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan PHLN. Dana ini digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program BP2BT pada kualitas konstruksi bangunan rumah dan keterhunian rumah akad kredit Tahun 2022. Tanpa menambah jumlah pagu anggaran, Dit.PPP juga menggunakan dana operasional ini untuk mendukung operasional pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sehingga didapati tambahan 1 (satu) output berupa layanan Operasional untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Biaya Administrasi.

4.2.1 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

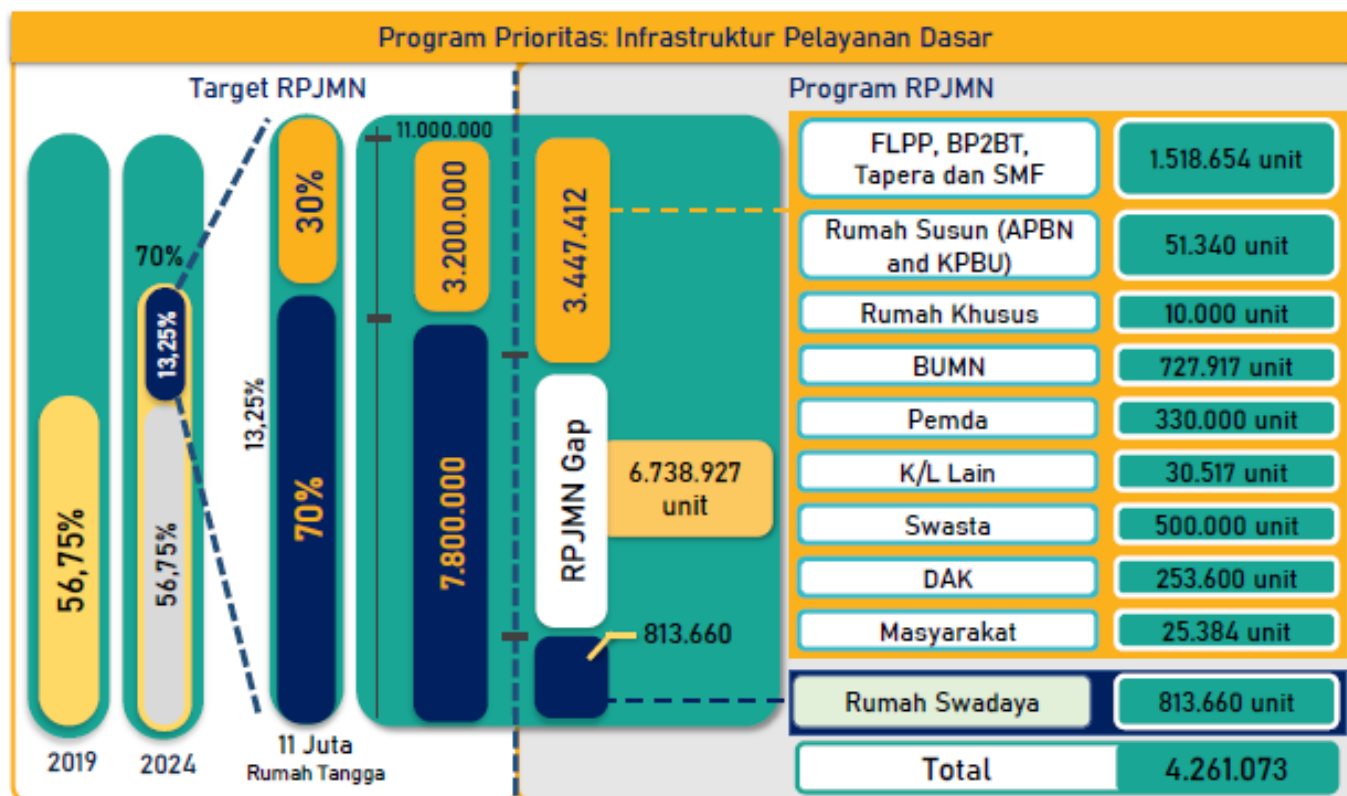
Perbandingan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Perbandingan Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2020	2021	2022	2023
Program Dukungan Manajemen								
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	23,25%	25,00%	24,56%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	48,38%	49,35%	106,07%

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

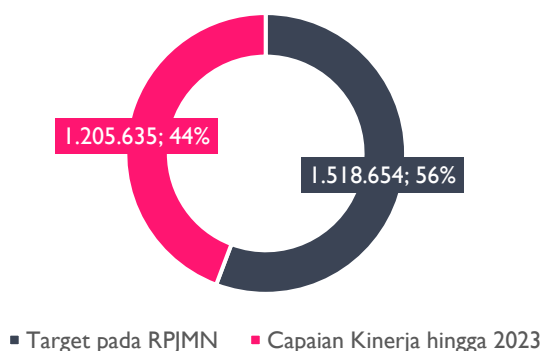
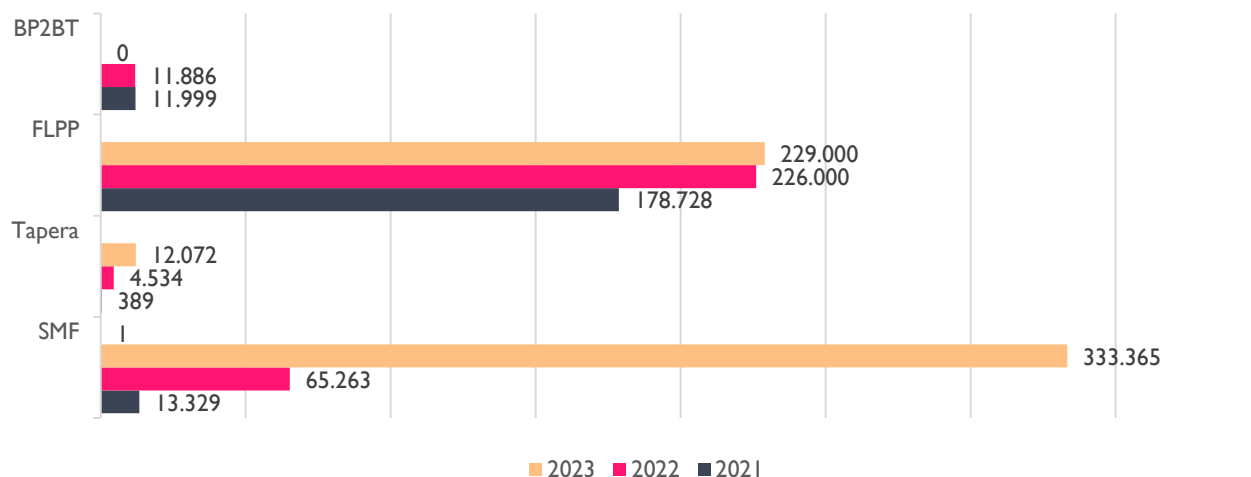
Salah satu Agenda Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ‘Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar’ terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, khususnya terkait dengan Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau yaitu Indikator ‘Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau dengan target hingga 2024 yaitu 70%. Hubungan antara RPJMN dengan program yang dijalankan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Struktur Hubungan RPJMN dengan Program yang Dijalankan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Program RPJMN 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yaitu BP2BT serta program yang terkait dengan mitra kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah FLPP, Pembiayaan Tapera, dan Pembiayaan PT. SMF. Perbandingan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terhadap standar nasional RPJMN 2020 – 2024 pada Program Prioritas: Infrastruktur Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

Grafik 4.1 Perbandingan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun, 2021, 2022 dan 2023





Grafik 4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Pembiayaan Perumahan dengan RPJMN

Total capaian kinerja seluruh program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dari Tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 1.205.635 unit atau sebesar 80% jika dibandingkan dengan target pada RPJMN 2020 – 2024 sebesar 1.518.645 unit.

4.3. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL (BENCHMARKING)

Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan kinerja Kementerian PUPR dengan Kementerian PPN/Bappenas pada Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. Perbandingan kinerja ini berdasarkan pada kesamaan kinerja pada Sasaran Strategi/ Sasaran Program/Sasaran Kegiatan. Meskipun setiap instansi memiliki fokus dan target kinerja yang berbeda, kontribusi mereka bersifat komplementer dan saling mendukung.

Tabel 4. 11 Sasaran Strategi Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas

SASARAN STRATEGI	
 Kementerian PUPR	 Kementerian PPN/Bappenas
SS-3: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living ; (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner .

Jika dibandingkan dengan Sasaran Strategi (SS) terdapat kesamaan pada SS-3 Kementerian PUPR dengan SS-3 Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Meskipun secara konteks penulisan SS terdapat perbedaan kalimat namun secara makna memiliki pengertian yang hampir serupa sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan kinerja dengan standar nasional (*Benchmarking*).

Sasaran Strategi Pada Kementerian PUPR Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman melalui indikator kinerja melalui *smart living*, hampir sama maknanya dengan sasaran strategi Kementerian PPN/Bappenas yang dalam mewujudkan kebijakan pembangunan nasional menggunakan pendekatan yang visioner.

Tabel 4. 12 Rencana Strategi dan Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Sasaran Strategis (Sastra)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	75	80	85	90	95
	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	87,5%	n/a	n/a	n/a
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	80 – 83,9%	84 – 87,9%	88 – 91,9%	92 – 95,9%	96 – 100%
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85 – 87,9%	88 – 90,9%	91 – 93,9%	94 – 96,9%	97 – 100%
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75 – 79,9%	80 – 84,9%	85 – 89,9%	90 – 94,9%	95 – 100%
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83,00	86,00	90,00	90,50	91,00
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	88	90	92	95
	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%

Capaian kinerja Kementerian PUPR

Pada Capaian kinerja SS-3 di Kementerian PUPR: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau. Kementerian PUPR telah berupaya meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau melalui pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman dengan pendekatan *smart living*, serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sesuai amanat RPJMN 2020-2024.

Tabel 4. 13 Tabel capaian kinerja Kementerian PUPR pada SS-3

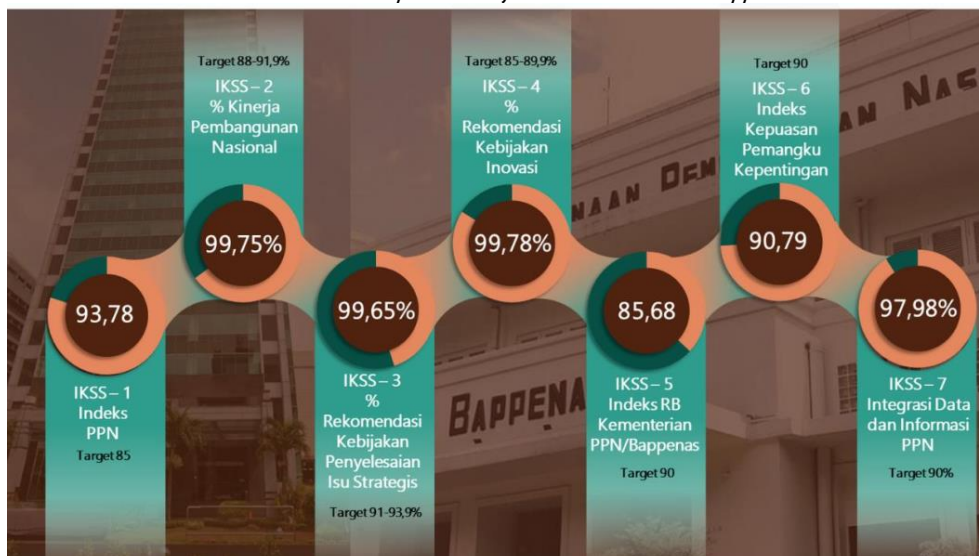
SS/Indikator Kinerja		Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
SS-3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau			
IKSS-1	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	80,07	76,41	95,43
IKSS-2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	58,02	57,73	99,50

Pada IKSS-2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, dicapai dan diselenggarakan oleh Ditjen. Perumahan dan Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Perhitungan capaian kinerja IKSS dicapai melalui perhitungan yang telah disesuaikan dengan manual perhitungan indikator yang terdapat dalam Lampiran Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Adapun akumulasi jumlah rumah layak huni yang dibangun oleh Ditjen. Perumahan pada 2020-2022 adalah sebanyak 567.155 unit, sedangkan akumulasi jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada 2020-2022 sebanyak 721.560 unit. Sehingga pada 2022 capaian kinerja untuk IKSS ini diperoleh sebesar 99,50%.

Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

Pada Capaian Kinerja SS-3 Kementerian PPN/Bappenas: Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional Yang Visioner. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut dengan Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra K/L dan sektor terkait, menggunakan teknologi dan informasi untuk berkoordinasi mitra K/L secara intensif dan efisien dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan tersebut bersama Mitra K/L sehingga hasil yang dicapai dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Tabel 4. 14 Tabel capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas



Tabel 4. 15 Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas pada Indikator penilaian rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional dan kebijakan inovasi pembangunan yang dijalankan oleh K/L

Indikator Penilaian	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	85-87,9%	100%	88-90,9%	99,57%	91-93,9%	99,65%

Indikator Penilaian	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	75-79,9%	100%	80-84,9%	99,55%	85-89,9%	99,78%

Membandingkan dengan Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas

Selain itu perbandingan lainnya dapat dilihat pada tingkat unit kerja dari kedua Instansi Pemerintah tersebut yaitu pada Direktorat Pelaksanaan pembiayaan yang merupakan unit kerja eselon II di Kementerian PUPR dan Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kesamaan tugas yang dimiliki membuat kedua unit kerja lintas instansi ini saling berkoordinasi untuk mewujudkan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau. Berikut tugas Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Tabel 4. 16 Tugas Dit.PPP, Kementerian PUPR dan Dit.PKP, Kementerian PPN/Bappenas

TUGAS	
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR	Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perumahan dan Kawasan permukiman

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan juga banyak melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) khususnya pada Proyek KPBU Bidang Perumahan dengan unit kerja lain di Kementerian PPN/Bappenas yaitu dengan Direktorat Pengembangan dan Pendanaan, Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan.

Pelaksanaan koordinasi ini sangat penting untuk memastikan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek yang melibatkan partisipasi sektor swasta. Sehingga menciptakan sinergi antara Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengelola proyek KPBU, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Target Kinerja Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Berikut tugas Direktorat Pengembangan dan Pendanaan:

Tabel 4. 17 Tugas Dit.PPP, Kementerian PUPR dan Dit.Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas

TUGAS	
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR	Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan	Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan pendanaan pembangunan yang melibatkan kerja sama pemerintah dengan swasta.

Target Kinerja Direktorat Pengembangan dan Pendanaan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024:

Tabel 4. 18 Target Kinerja Direktorat Pengembangan dan Pendanaan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN							
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran	Indikator	Target				
	Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan						
Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan	01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Pendanaan	% Keselarasan muatan dokumen Rencana Proyek KPBU dengan RPJMN	75%	80%	85%	90%	95%
		%Keselarasan bidang pada project pipeline dengan sasaran prioritas dan/atau bidang RKP tahun berjalan dengan RPJMN	75%	80%	85%	90%	95%
	02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Pendanaan	% ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas rencana pembangunan lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan	80- 83,9 %	84- 87,9 %	88- 91,9 %	92- 95,9 %	96- 100 %
		% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan	80- 83,9 %	84- 87,9 %	88- 91,9 %	92- 95,9 %	96- 100 %
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran	Indikator	Target				
	03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan	% rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholder pembangunan bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan	85- 87,9 %	88- 90,9 %	91- 93,9 %	94,96,9 %	97- 100 %
	04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan	% rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan	85- 87,9 %	88- 90,9 %	91- 93,9 %	94,96,9 %	97- 100 %

Target Kinerja Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 pada Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional:

Tabel 4. 19 Target Kinerja Direktorat Pengembangan dan Pendanaan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran	Indikator	Target				
Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	% Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	75%	80%	85%	90%	95%
		% Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	75%	80%	85%	90%	95%
		% Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	75%	-	-	-	95%
		% kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	75%	80%	85%	90%	95%
		% Proyek Infrastruktur Nasional dalam dokumen Renja K/L dan RKA K/L	75%	80%	85%	90%	95%
	02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup	% ketersediaan informasi hasil pemantauan, evaluasi atas rencana pembangunan lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	80-83,9	84-87,9	88-91,9	92-95,9	96-100

4.4. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Struktur Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2023, alokasi Pagu Tahun 2023 sebesar Rp41.909.390.000. Pada tanggal 22 Desember 2023 terdapat penambahan Pagu Anggaran pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebesar Rp55.972.000.000 sehingga pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan termasuk BBA menjadi sebesar Rp97.881.390.000.



Grafik 4. 3 Perbandingan Realisasi Anggaran Bulanan TA 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target yang direncanakan pada awal tahun dengan realisasi. Realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan *Integrated e-Monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status 31 Desember 2023 sebesar 91,04% atau sejumlah Rp89.109.376.147 dan kinerja fisik sebesar 92,28%. Rincian realisasi anggaran pada Bulan Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
033.16.IA	Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.204.033.000	78.100.734.147	91,66%	91,93%	100,30%
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	85.204.033.000	78.100.734.147	91,66%	91,93%	100,30%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	7.822.000.000	7.519.727.000	96,14%	96,70%	100,59%
4976.ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	7.822.000.000	7.519.727.000	96,14%	96,70%	100,59%
051	Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	3.800.000.000	3.723.996.000	98,00%	98,64%	100,65%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
051.A	Kajian Pembiayaan Perolehan Sarusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1.364.280.000	1.323.978.000	97,05%	98,00%	100,98%
051.B	Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	2.435.720.000	2.400.018.000	98,53%	99,00%	100,47%
052	Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	2.172.000.000	2.008.816.000	92,49%	93,06%	100,62%
052.A	Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1.200.000.000	1.154.117.000	96,18%	97,00%	100,86%
052.B	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan	956.097.000	838.796.000	87,73%	88,00%	100,31%
052.C	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Dit. PPP	15.903.000	15.903.000	100,00%	100,00%	100,00%
053	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1.850.000.000	1.786.915.000	96,59%	97,00%	100,42%
053.A	Koordinasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan	1.850.000.000	1.786.915.000	96,59%	97,00%	100,42%
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	2.190.000.000	2.036.281.000	92,98%	93,75%	100,83%
4976.AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	2.190.000.000	2.036.281.000	92,98%	93,75%	100,83%
051	Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	2.190.000.000	2.036.281.000	92,98%	93,75%	100,83%
051.A	Pengembangan Skema dan Mekanisme Pembiayaan Perolehan Sarusun Dengan Sewa Beli	1.000.000.000	970.807.000	97,08%	98,00%	100,95%
051.B	Penyusunan Tata Laksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM	500.000.000	386.400.000	77,28%	78,00%	100,93%
051.C	Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	690.000.000	679.074.000	98,42%	99,00%	100,59%
BEB	Bantuan Biaya Administrasi	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%	100,19%
4976.BEB.001	Bantuan Biaya Administrasi	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%	100,19%
051	Bantuan Biaya Administrasi	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%	100,19%
051.A	Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA)	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%	100,19%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.720.000.000	5.278.650.000	78,55%	79,00%	100,57%
4976.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.720.000.000	5.278.650.000	78,55%	79,00%	100,57%
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	6.720.000.000	5.278.650.000	78,55%	79%	101%
051.A	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	253.648.000	239.134.000	94,28%	95,00%	100,77%
051.B	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	240.000.000	237.334.000	98,89%	99,00%	100,11%
051.C	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	226.352.000	122.062.000	53,93%	54,00%	100,14%
051.D	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	2.000.000.000	1.556.052.000	77,80%	78,00%	100,25%
051.E	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	2.000.000.000	1.543.661.000	77,18%	78,00%	101,06%
051.F	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	2.000.000.000	1.580.407.000	79,02%	80,00%	101,24%
PEA	Koordinasi	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%	100,21%
4976.PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%	100,21%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%	100,21%
051.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tabungan Perumahan Rakyat	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%	100,21%
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	9.500.000.000	7.789.032.000	81,99%	82,34%	100,42%
4976.QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000.000	4.404.011.000	97,87%	98,00%	100,14%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000.000	4.404.011.000	97,87%	98,00%	100,14%
051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	4.500.000.000	4.404.011.000	97,87%	98,00%	100,14%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
4976.QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	5.000.000.000	3.385.021.000	67,70%	68,24%	100,80%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	5.000.000.000	3.385.021.000	67,70%	68,24%	100,80%
051.A	Dana Operasional untuk mendukung pelaksanaan PHLN	2.477.345.000	2.397.734.000	96,79%	97,00%	100,22%
051.B	Dana Operasional untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Biaya Administrasi	2.522.655.000	987.287.000	39,14%	40,00%	102,21%
033.WA	Program Dukungan Manajemen	12.677.357.000	11.008.642.000	86,84%	94,62%	108,97%
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
EBA	Layanan Perkantoran	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
4194.EBA.994	Operasionalisasi Kantor Direktorat	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
002	Pelaksanaan Operasional Pekantoran Direktorat PPP	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
002.P	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	11.677.357.000	10.011.403.000	85,73%	94,16%	109,83%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5.217.357.000	5.148.575.000	98,68%	99,09%	100,41%
4197.ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	960.244.000	96,02%	97,00%	101,02%
051	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	960.244.000	96,02%	97,00%	101,02%
051.A	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	960.244.000	96,02%	97,00%	101,02%
4197.ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.467.357.000	2.464.604.000	99,89%	100,00%	100,11%
052	Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.467.357.000	2.464.604.000	99,89%	100,00%	100,11%
052.A	Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Rusun Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	2.467.357.000	2.464.604.000	99,89%	100,00%	100,11%
4197.ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.750.000.000	1.723.727.000	98,50%	99,00%	100,51%
051	Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.750.000.000	1.723.727.000	98,50%	99,00%	100,51%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
051.A	Pengusahaan Dukungan Pemerintahan terhadap KPBU Perumahan	1.000.000.000	981.908.000	98,19%	99,00%	100,82%
051.B	Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan	750.000.000	741.819.000	98,91%	99,00%	100,09%
AEE	Kemitraan	5.000.000.000	3.714.016.000	74,28%	93,40%	125,74%
4197.AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	5.000.000.000	3.714.016.000	74,28%	93,40%	125,74%
051	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	2.000.000.000	1.816.193.000	90,81%	91,00%	100,21%
051.A	Pelaksanaan Dukungan Transaksi KPBU Perumahan	2.000.000.000	1.816.193.000	90,81%	91,00%	100,21%
052	Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	3.000.000.000	1.897.823.000	94,89%	95,00%	100,11%
052.A	Pendampingan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	2.000.000.000	1.897.823.000	94,89%	95,00%	100,11%
052.B	Pendampingan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1.000.000.000	913.563.000	91,36%	92,00%	100,70%
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%	100,20%
4197.AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%	100,20%
051	Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%	100,20%
051.A	Penyusunan NSPK KPBU Bidang Perumahan	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%	100,20%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	960.000.000	694.713.000	72,37%	73,00%	100,88%
4197.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	960.000.000	694.713.000	72,37%	73,00%	100,88%
057	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	960.000.000	694.713.000	72,37%	73,00%	100,88%
057.A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan	240.000.000	183.420.000	76,43%	77,00%	100,75%
057.B	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan	240.000.000	195.972.000	81,66%	82,00%	100,42%
057.C	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan	240.000.000	168.302.000	70,13%	71,00%	101,25%
057.D	Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	240.000.000	147.019.000	61,26%	62,00%	101,21%
TOTAL PAGU DENGAN BBA		97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%

Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023

Pelaksanaan monitoring kinerja realisasi capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan proyek atau program. Proses ini mencakup analisis data, perbandingan dengan target yang telah ditetapkan, dan identifikasi potensi perbaikan. Berikut disajikan tabel informasi target, realisasi, dan kinerja pada indikator kinerja kegiatan TA 2023:

Tabel 4. 21 Kinerja Realisasi Capaian IKK Tahun 2023

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SPT	OKT	NOV	DES
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan													
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Target	0.25%	1.25%	3.00%	4.75%	5.50%	6.75%	8.75%	10.50%	14.75%	19.50%	22.25%	25%
	Realisasi	0.00%	0.09%	1.42%	4.34%	6.52%	8.99%	10.24%	12.33%	15.27%	16.87%	20.44%	24.56%
	Kinerja	0.00%	7.20%	47.33%	91.32%	118.55%	133.22%	117.06%	117.38%	103.51%	86.50%	91.85%	96.52%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan													
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Target	1.00%	5.00%	12.00%	19.00%	22.00%	27.00%	35.00%	42.00%	59.00%	78.00%	89.00%	100%
	Realisasi	0.46%	2.24%	5.02%	13.49%	16.55%	21.99%	27.94%	35.24%	38.69%	51.40%	62.31%	106.07%
	Kinerja	46.00%	44.80%	41.83%	71.00%	75.23%	81.44%	79.83%	83.90%	65.58%	65.90%	70.01%	106.07%

IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan

a. Keterangan

Akumulasi realisasi capaian indikator kinerja Tahun 2023 pada IKK tingkat pencapaian pelaksanaan penyiapan investasi pembiayaan perumahan sebesar 24,56% nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 25% sehingga masih terdapat deviasi.

b. Permasalahan

Secara substansi permasalahan yang ada masih dapat dilakukan perbaikan. Belum tercapainya realisasi capaian indikator kinerja bulan ini dikarenakan realisasi pelaksanaan Prakuifikasi pada Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung yang sebelumnya ditargetkan pada bulan Oktober 2023 tidak dapat dilakukan di Desember 2024. Untuk pelaksanaan paket kegiatan lainnya sudah dilakukan secara periodik dan sesuai timeline rencana pelaksanaan. Pada pelaksanaan Monev Proyek KPBU Bidang Perumahan telah dilakukan secara periodik. Pedoman Monev KPBU Bidang Perumahan telah ditandatangani pada 20 Desember 2023. Selanjutnya untuk tahap penyiapan Proyek KPBU, Dit.PPP telah selesai melakukan Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Rusun Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Surabaya.

c. Tindak Lanjut

Melaksanakan Pengumuman Prakuifikasi Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung pada Januari 2024

IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

a. Keterangan

Realisasi capaian indikator kinerja IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan sebesar 106.07% dengan target 100%. terkait penyaluran program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, realisasi penyaluran FLPP sudah tercapai sebanyak 229.000 unit di atas target Renstra PUPR TA 2023 yaitu 220.000 unit

b. Permasalahan

- 1) Terdapat gap realisasi FLPP dan SBUM sebanyak 9.000 unit, karena ada perbedaan target Renstra PUPR dengan target kontrak kinerja BP Tapera.
- 2) Untuk penyaluran SSB/SSM, terdapat potensi kekurangan anggaran DIPA disebabkan suku bunga acuan yang digunakan saat penganggaran lebih rendah dengan suku bunga realisasi (suku bunga saat penganggaran 10,1%, suku bunga realisasi rata-rata 11,51%).

c. Tindak Lanjut

Akan dilakukan pembahasan SE Dirjen Juknis pengendalian KBPP, penyaluran BBA TA 2024, pemenuhan dokumen 6 (enam) area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas, menyusun rencana pembayaran SBUM dan SSB/SSM pada Bulan Desember 2023 agar tetap ada penyaluran pada bulan tersebut serta berkoordinasi dengan Bank Pelaksana mengenai kekurangan bayar di Tahun 2023 yang akan dibayarkan di Tahun 2024 dan penarikan belanja bulanan rutin seperti gaji KI

4.5. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan terhadap pagu anggaran Tahun 2023. Upaya pelaksanaan efektivitas dan efisiensi anggaran adalah dengan melakukan beberapa kegiatan koordinasi, rapat, dan FGD secara daring. Selain itu pelaksanaan koordinasi yang harus dilakukan secara bergantian dilakukan secara paralel untuk membahas masing – masing program maupun proyek KPBU sebagai contoh kegiatan pemantauan penerapan manajemen risiko yang dilakukan pemantauan inovasi pengendaliannya bersamaan pada kegiatan penyelesaian isu proyek terkait, dan pelaksanaan tambahan paket kegiatan yang mengoptimalkan pagu anggaran eksisting sebagai contoh penambahan paket output Penyusunan Tata Laksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM dan kegiatan layanan Operasional untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Biaya Administrasi.

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan pada paket kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dimana sebagian dana tersebut digunakan tidak hanya untuk kegiatan Operasional dalam mendukung pelaksanaan PHLN Operasional namun juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan program inovasi yang dilakukan oleh Dit.PPP yaitu operasional pelaksanaan Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi yang mana pada Tahun 2023 tidak dialokasikan anggaran pada kegiatan tersebut.

Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi menjadi contoh inovasi yang telah dilakukan oleh Dit.PPP, dikarenakan program penyaluran subsidi rumah tangga ini sebelumnya tidak tercantum pada Renstra Kementerian PUPR TA 2020-204 namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, Dit.PPP mampu menyalurkan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) kepada 13.993 rumah tangga di TA 2023.

Selain itu efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan juga dilakukan pada kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2022 dikarenakan akun anggaran kegiatan terkait dengan Laporan Kinerja mengalami *Automatic Adjustment* atau diblokir, sehingga seluruh koordinasi, FGD, dan evaluasi dilakukan secara daring dan penggunaan ruang rapat yang ada di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

4.6. PENGHARGAAN DAN INOVASI ATAS KINERJA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2023 telah memperoleh penghargaan *sebagai outstanding affordable housing innovation* yang diberikan dari *Habitat for Humanity International, Asia-Pacific* pada tanggal 27 Oktober 2023, di Sowun, Korea Selatan. Penghargaan ini membuktikan bahwa Program BP2BT merupakan salah satu inovasi program pembiayaan perumahan yang berkualitas dan diakui secara Internasional.



Gambar 4. 3 Penghargaan dari Habitat for Humanity International, 27 Oktober 2023, di Sowun, Korea Selatan.

Inovasi yang dilakukan pada tahun 2023 adalah membuat Peraturan Menteri PUPR No.11 Tahun 2023 tentang bantuan biaya administrasi (BBA) pembiayaan pemilik rumah bagi MBR. Bantuan biaya administrasi ini diberikan kepada masyarakat sesuai surat pengakuan kurang bayar biaya administrasi maksimal Rp 4 juta.

Selain membuat rekomendasi kebijakan yang dari awal tidak terdapat pada target rencana strategis di Tahun 2023, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan juga merealisasikan Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebanyak 13.160 rumah tangga atau senilai Rp52.513.355.147,00 pada Tahun 2023, dimana program penyaluran ini tidak terdapat pada Renstra DJPI, Kementerian PUPR 2020 – 2024.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENDAHULUAN RENDAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas makro ekonomi dan keberlanjutan fiskal perlu meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pemenuhan biaya administrasi dalam memperoleh rumah melalui kredit kepemilikan rumah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpendahuluan Rendah;

Gambar 4. 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpendahuluan Rendah

4.7. PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala mingguan, bulanan, dan triwulanan. Pemantauan dan evaluasi mingguan yang dilakukan untuk melihat kinerja anggaran, kinerja penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan *update* kegiatan dan isu / permasalahan yang ditemukan saat Pelaksanaan proyek KPBU dan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Laporan Bulanan merupakan bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya untuk mengukur kinerja anggaran dan penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disandingkan dengan target kinerja bulanan, serta identifikasi dan tindak lanjut terhadap isu dan permasalahan.

Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan dilakukan pada Q1, Q2, dan Q3 untuk dapat mengukur kinerja anggaran dan penyaluran program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan serta prognosinya hingga akhir tahun anggaran, mengetahui secara keseluruhan kendala dan isu permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan mitra kerja, serta menyusun strategi dan percepatan terhadap isu dan kendala yang dihadapi.

Selain itu juga dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang dilakukan pada akhir tahun anggaran, sehingga Pemantauan dan Evaluasi triwulanan dan akhir tahun dilakukan pada tanggal sebagai berikut:

Tabel 4. 22 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

1	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q1 TA 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Jumat, 14 April 2023
2	Rapat Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2022	Selasa, 4 Juli 2023
3	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q2 TA 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Selasa, 7 Agustus 2023
4	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q3 TA 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Senin, 23 Oktober 2023
5	Pemantauan Progres Pengisian Kinerja pada Matriks Sasaran Strategi, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Dit.PPP	Senin, 30 Oktober 2023
6	Koordinasi Penyiapan Investasi Perumahan RPJMN 2025-2029	Kamis, 23 November 2023
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Target Bidang Pembiayaan Perumahan dalam Kerangka RPJMN 2025-2029	Jumat, 1 Desember 2023
8	Penyiapan Penyusunan Laporan Kinerja TA 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Rabu, 13 Desember 2023
9	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja TA 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Kamis, 21 Desember 2023

Selain pembahasan evaluasi capaian kinerja secara berkala yang dilakukan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan juga melakukan pembahasan atas rekomendasi yang diberikan oleh Evaluator SAKIP Tahun Anggaran 2022 sebagai upaya untuk melakukan perbaikan.

4.8. TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap rekomendasi pada Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi LAKIN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pada Tahun 2023, Indonesia akan melanjutkan strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga perlu menggunakan kesempatan ini untuk mendorong percepatan pencapaian target penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan sesuai dengan renstra DJPI.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan mitra kerja melakukan penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan sesuai dengan Rencana Strategis, yaitu melalui Program BP2BT, SBUM, FLPP, Pembiayaan Tapera, dan Pembiayaan PT. SMF (Persero).
2	Melakukan <i>midterm review</i> Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan melakukan Koordinasi Penyiapan Investasi Perumahan RPJMN 2025-2029 pada Kamis, 23 November 2023 dan Koordinasi dan Sinkronisasi Target Bidang Pembiayaan Perumahan dalam Kerangka RPJMN 2025-2029 pada Jumat, 1 Desember 2023
3	Finalisasi pengajuan PDF KPBU Perumahan di KIPP-IKN dan Desa besar	Hingga Laporan Kinerja ini dikeluarkan, pengajuan PDF KPBU Perumahan di IKN masih dalam proses pengajuan. Pengajuan PDF Perumahan di IKN tersebut diperuntukkan untuk 4 (empat) proyek <i>unsolicited</i> KPBU IKN. Sedangkan PDF untuk proyek KPBU Desa Besar, Medan tidak jadi diajukan dikarenakan proyek tersebut di- <i>hold</i> atas arahan Menteri PUPR.
4	Penyiapan Berita Acara Kesepakatan dan Penyiapan konsep/rancangan Perjanjian Fasilitas KPBU Karawang Spuur	Penyusunan FBC Proyek KPBU Karawang Spuur menggunakan fasilitas Kementerian Keuangan melalui PT. SMI.
5	Penyempurnaan OBC Daan Mogot, Rusun TOD, dan Paldam	Saat ini OBC Proyek KPBU Rusun TOD Lebak Bulus sedang direviu. Sedangkan Proyek KPBU Rusun Daan Mogot atas permintaan Pemerintah DKI Jakarta saat ini sedang di- <i>hold</i> dan Proyek KPBU Rusun Paldam saat ini masih menunggu keputusan Walikota Bandung untuk keberlanjutannya.
6	Pelaksanaan PDF oleh PT.PII KPBU Sei Mangkei	Pelaksanaan PDF oleh PT. PII untuk KPBU Sei Mangkei pada tahun 2022 difokuskan pada finalisasi FBC terutama perhitungan biaya investasi dan skema pengembalian yang disetujui PJPk.
7	Penyelesaian FBC Cisaranten	FBC Cisaranten dalam masa finalisasi dan akan segera dilakukan transaksi yang ditargetkan akan dilaksanakan pada Q4 Tahun 2023.
8	Penyusunan SOP Pemantauan KPBU Sektor Perumahan	Draf SOP Pemantauan KPBU Sektor Perumahan telah disusun namun berdasarkan masukan pada Rapat Pembahasan Finalisasi Konsep Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan tanggal 20 Desember 2023, lingkup SOP Pemantauan KPBU Sektor

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Perumahan diperkecil menjadi lingkup Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, sehingga SOP Pemantauan KPBU Sektor Perumahan di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ditargetkan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2023.
9	Evaluasi berkala terhadap program SSB SBUM dalam rangka mendorong penyaluran bantuan yang tepat waktu	Program SSB dan SBUM dievaluasi secara berkala oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Q1, Q2, dan Q3 Tahun Anggaran 2023.

4.9. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Terdapat rekomendasi berdasarkan surat Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan Nomor surat PR 0304-Pj/03 hal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2022. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Komponen	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	-
2	Pengukuran Kinerja	a. Informasi pada Laporan Bulanan harus berisi sandingan capaian kinerja dengan PK b. Mendorong BPSDM untuk membuat aturan terkait pemberian reward and punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan dasar pengukuran kinerja
3	Pelaporan Kinerja	b. Menyampaikan Laporan Kinerja dengan tepat waktu c. Menyampaikan informasi mengenai analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Tingkat nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dalam Lakin.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Mendorong pusdatin dan Sekjen dalam mengembangkan aplikasi e-Sakip

Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Evaluator SAKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	-	
2	Pengukuran Kinerja	a. Informasi pada Laporan Bulanan harus berisi sandingan capaian kinerja dengan PK b. Mendorong BPSDM untuk membuat aturan terkait pemberian reward and punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan dasar pengukuran kinerja	a. Dit.PPP telah menyampaikan informasi sandingan capaian kinerja dengan PK pada Laporan Bulanan dan pada aplikasi e-sakip. b. Pemanfaatan penerapan hasil capaian kinerja untuk memberikan promosi atau kenaikan/penurunan insentif dengan reward and punishment atas hasil evaluasi capaian kinerja akan dibahas lebih lanjut dengan Bagian Kepegawaian Setditjen PI dan berkoordinasi dengan BPSDM PUPR
3	Pelaporan Kinerja	a. Menyampaikan Laporan Kinerja dengan tepat waktu b. Menyampaikan informasi mengenai analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Tingkat nasional/international (Benchmark Kinerja) dalam Lakin.	a. Dit.PPP telah mengupayakan penyampaian Lakin tepat waktu, dengan melakukan koordinasi pembahasan penyusunan Lakin pada tanggal 13 Desember 2023 b. Dit PPP telah melakukan <i>benchmarking</i> dengan Kementerian PPN/Bappenas c.q. Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Mendorong pusdatin dan Sekjen dalam mengembangkan aplikasi e-Sakip	Koordinasi dengan Dit.PSSPP dalam mengembangkan aplikasi e-sakip

BAB 5

PENUTUP

Bab ini menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun 2023 dan rekomendasi dan langkah tindak lanjut ke depan.

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali.

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tertera di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024.

Penerbitan DIPA Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2023 pertama pada tanggal 30 November 2022 dengan pagu anggaran sebanyak Rp 41.909.390.000,00. DIPA kemudian mengalami 9 (Sembilan) kali revisi. Pagu anggaran sendiri mengalami 1 (satu) kali perubahan yaitu pada DIPA Revisi 9. Pada DIPA 9 Revisi ke 09 tanggal 22 Desember 2023, pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengalami penambahan dana untuk pelaksanaan penyaluran bantuan biaya administrasi sebesar Rp 55.792.000.000,00 yang diperuntukan penyaluran bantuan biaya administrasi pada 13.993 keluarga. Sehingga jumlah pagu anggaran semula Rp 41.909.390.000,00 menjadi Rp 97.881.390.000,00 DIPA Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2023 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan tidak mengalami perubahan hingga 31 Desember 2023. Adapun besaran Pagu anggaran sebesar Rp4.352.520.000.000 untuk penyaluran pengelolaan subsidi perumahan dengan target penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) kepada 220.000 unit dengan pagu anggaran sebanyak Rp895.000.000.000,00 dan pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) penerbitan tahun sebelumnya (ulang tahun) sebanyak Rp 3.457.520.000.000,00 yang dibayarkan kepada 754.004 unit.

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 24,56%. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan IKK Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dapat terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 106,07%.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi anggaran berdasarkan Integrated e-Monitoring Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status 31 Desember 2023 sebesar 91,04% atau sejumlah Rp89.109.376.147 dan kinerja fisik sebesar 92,28%.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Pendukung keberhasilan Laporan Kinerja melibatkan kontribusi positif terhadap capaian kinerja. Faktor pendukung yang telah diterapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan diantaranya keterlibatan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan capaian kinerja, sumber daya yang memadai, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan fokus pada capaian organisasi.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan turut melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala mingguan, bulanan, dan triwulanan. Pemantauan dan evaluasi mingguan yang dilakukan untuk melihat kinerja anggaran, kinerja penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan *update* kegiatan dan isu / permasalahan yang ditemukan saat Pelaksanaan proyek KPBU dan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan

Perumahan. Laporan Bulanan merupakan bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya untuk mengukur kinerja anggaran dan penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disandingkan dengan target kinerja bulanan, serta identifikasi dan tindak lanjut terhadap isu dan permasalahan.

5.2. REKOMENDASI

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 pada Program Dukungan Manajemen yang terkait dengan Proyek KPBU Bidang Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Isu dan Pelaksanaan Tahap Transaksi Proyek KPBU Bidang Perumahan sesuai rencana target yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan Tahap Perencanaan, Tahap Penyiapan, dan Tahap Transaksi berdasarkan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan;
3. Financial Close Berjalan Paralel dengan Proses Konstruksi;
4. Pengusulan PSN dan Major Project Proyek KPBU Perumahan pada RPJMN Periode 2025-2029.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pilot Project Optimalisasi FLPP dengan Model Pengelolaan Dana Investasi;
2. Pelaksanaan Pelaksanaan Pilot Project Skema Pembiayaan untuk Masyarakat Informal bersama Koalisi Perumahan Gotong Royong;
3. Pelaksanaan skema KPR ASN PUPR Pelopor di IKN;
4. Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi TA 2024;
5. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersama dengan BP Tapera dan Bank Pelaksana melakukan optimalisasi fitur integrasi antara FLPP dan SBUM (e-flpp 2.0), dalam mengurangi GAP waktu penyaluran dan jumlah unit antara FLPP dan SBUM;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keterhunian rumah yang difasilitasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I, II, III.

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 pada Program *Indonesia Green and Affordable Housing* adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Desain Prototype Rumah Sederhana Hijau;
2. Penyelesaian Readiness Criteria pengusulan Green Book 2024;
3. Piloting 25-30 Green HMF melalui Dana Hibah *Build Change* di Jawa Tengah;
4. Pencapaian target 100.000 unit rumah hijau di tahun 2024.

LAMPIRAN

A decorative graphic in the top right corner of the page. It consists of a series of concentric diamond shapes (squares rotated 45 degrees) formed by thin, light orange lines. The diamonds are nested, with the smallest one in the center and larger ones radiating outwards towards the top right corner of the page.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan</i>	25%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	
<i>IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	100%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	100%

KEGIATAN

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

ANGGARAN

Rp29.232.033.000,00
Rp12.677.357.000,00
Rp4.352.520.000.000,00

JAKARTA, JANUARI 2023

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**


HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN**


HARYO BEKTI MARTOYOEDO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bkti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2023

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~27~~Desember 2023

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan		25%	
ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan
AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4	Kesepakatan
AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		100%	
ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5	Rekomendasi Kebijakan
AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	3	NSPK
BEB.001	Bantuan Biaya Administrasi	13.993	Keluarga
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30	Dokumen
PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1	Kegiatan
QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1	Layanan
QAH.002	Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	1	Layanan

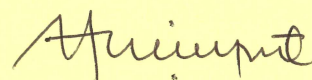
KEGIATAN

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

ANGGARAN

Rp85.204.033.000,00
Rp12.677.357.000,00
Rp4.352.520.000.000,00

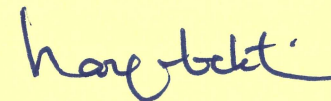
**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

JAKARTA, 27 DESEMBER 2023

**DIREKTUR PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**



HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan		25%	
ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan
AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4	Kesepakatan
AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		100%	
ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5	Rekomendasi Kebijakan
AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	3	NSPK
BEB.001	Bantuan Biaya Administrasi	13.993	Keluarga
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30	Dokumen
PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1	Kegiatan
QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1	Layanan
QAH.002	Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	1	Layanan

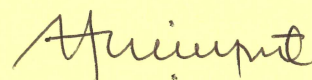
KEGIATAN

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

ANGGARAN

Rp85.204.033.000,00
Rp12.677.357.000,00
Rp4.352.520.000.000,00

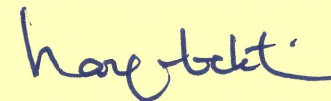
**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

JAKARTA, 27 DESEMBER 2023

**DIREKTUR PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**



HARYO BEKTI MARTOYOEDO



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 02 / BA / Dp / 2024

Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Hotel 101 Darmawangsa Jakarta telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	235,57	235,57
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	116,75	116,75
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	100,00	98,95	98,95
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	87,81	99,37	113,16

2. Capaian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI TA. 2023

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	16,13	107,53
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	100,00
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	100,00
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	15,00	150,00
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	18,75	125,00
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00	100,00

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100,00	109,86	109,86

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25,00	22,91	91,64

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25,00	25,00	100,00

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25,00	24,80	99,20

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00	24,56	98,24
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	106,07	106,07

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Januari 2024

Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal


Sudiro Roi Santoso

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan


Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air


Arvi Argyantoro

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan


Reni Ahiantini

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman


Meike Kencanawulan Martawidjaja

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan


Haryo Bakti Martoyoedo

Mengetahui,
Direktur Jenderal


Herry Trisaputra Zuna

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI TA. 2023

Nomor :
Tanggal : 18 Januari 2024

A. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2023

Status: 31 Desember 2023

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	25.180.000.000.000	220.000	26.320.045.507.031	229.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSB)*	3.457.520.000.000	754.004	3.457.520.000.000	750.497
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	895.000.000.000	220.000	895.000.000.000	220.000
4	SMF	-	10.000	6.493.872.078.412	333.988
5	TAPERA	1.050.000.000.000	12.072	1.042.845.955.685	7.249
TOTAL		30.582.520.000.000	242.072	38.209.283.541.128	570.237

Keterangan:

Target unit berdasarkan Renstra DJPI TA. 2020-2024 dan penyesuaian target Tapera sesuai Pengesahan atas RKAT BP Tapera Tahun 2023

*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 754.004 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

B. Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Capaian (%)
	96,42	30,00	28,93

C. Capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Capaian (%)
	96,50	30,00	28,95

D. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU Siap Dikerjasamakan TA. 2023

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI			
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	
1	Sumber Daya Air	5	5.141.240.929.000	2	PLTM Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan	134.219.000.000	359.599.000.000
					PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000	
2	Jalan dan Jembatan	2	66.432.251.000.000	5	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis	37.147.000.000.000	135.750.000.000.000
					Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan- Gresik	23.332.000.000.000	
					Jalan Tol Demak Tuban	49.607.000.000.000	
					Jalan Tol Gilimanuk Mengwi	22.840.000.000.000	
					Fly Over Sitinjau Lauik	2.824.000.000.000	
3	Permukiman	2	10.620.000.000.000	4	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang (BtoB)	1.940.000.000.000	27.179.725.000.000
					SPAM Batam-Bintan	14.438.858.000.000	
					SPAM Regional Ir. H.Djuanda/ Jatiluhur II	9.740.000.000.000	
					SPAM Regional Sinumbra	1.060.867.000.000	
4	Perumahan	4	61.230.000.000.000	2	Rusun Hankam WP 1A (60 tower)	14.990.000.000.000	16.660.000.000.000
					Rusun North Government WP 1A (6 tower)	1.670.000.000.000	
TOTAL		13	143.423.491.929.000	13	179.949.324.000.000		
Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)				70,00%			
Capaian Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)				87,83%			

Keterangan:

- Target berdasarkan DIPA DJPI TA. 2023
- Realisasi Proyek Siap Dikerjasamakan minimal menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS)

E. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)		FISIK (%)		
					RN	RL	RN	RL	KINERJA
I	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.204.033	78.534.648	100,00	92,17	100,00	92,42	92,42
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	85.204.033	78.534.648	100,00	92,17	100,00	92,42	92,42
II	WA	Program Dukungan Manajemen	157.988.004	155.816.386	100,00	98,63	100,00	98,86	98,86
1	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	73.396.881	72.536.007	100,00	98,83	100,00	99,10	99,10
2	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	19.398.894	19.191.105	100,00	98,93	100,00	99,79	99,79
3	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	65.192.229	64.089.275	100,00	98,31	100,00	98,32	98,32
TOTAL			243.192.037	234.351.034	100,00	96,36	100,00	96,60	96,60

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/>, status: 10 Januari 2024



BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

Nomor: 01/BA/Rp/2024

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Hotel Vega Gading Serpong telah diadakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja TA. 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang dihadiri oleh perwakilan dari Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Rapat ini dimaksudkan untuk membahas Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2023, sehingga dapat tercapai kesepakatan Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target	Capaian
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	24,56%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	106,07%

2. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBUI Siap Dikerjasamakan TA. 2023

	SEKTOR	TARGET TA. 2023		REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (xRp1,00)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (xRp1,00)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perumahan	4	61.230.000.000.000	2	Rusun Hankam WP 1A (60 tower)	14.990.000.000.000
					Rusun North Government WP 1A (6 tower)	1.670.000.000.000
TOTAL		4	2.118.000.000.000	2		16.660.000.000.000

4. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2023

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	25.180.000.000.000	220.000	26.320.045.507.031	229.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSB)*	3.457.520.000.000	754.004	3.457.520.000.000	750.497
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	895.000.000.000	220.000	895.000.000.000	220.000
4	SMF	-	10.000	6.493.872.078.412	333.988
5	TAPERA	1.050.000.000.000	12.072	1.042.845.955.685	7.249
TOTAL		30.582.520.000.000	242.072	38.209.283.541.128	570.237

Keterangan:

Target unit berdasarkan Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024

*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 754.004 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

5. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

(sumber data e-Monitoring akses 31 Desember 2023)

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
033.16.1A	Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.204.033.000	78.100.734.147	91,66%	91,93%	100,30%
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	85.204.033.000	78.100.734.147	91,66%	91,93%	100,30%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	7.822.000.000	7.519.727.000	96,14%	96,70%	100,59%
4976.ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	7.822.000.000	7.519.727.000	96,14%	96,70%	100,59%
051	Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	3.800.000.000	3.723.996.000	98,00%	98,64%	100,65%
051.A	Kajian Pembiayaan Perolehan Sarusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1.364.280.000	1.323.978.000	97,05%	98,00%	100,98%
051.B	Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	2.435.720.000	2.400.018.000	98,53%	99,00%	100,47%
052	Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	2.172.000.000	2.008.816.000	92,49%	93,06%	100,62%
052.A	Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1.200.000.000	1.154.117.000	96,18%	97,00%	100,86%
052.B	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan	956.097.000	838.796.000	87,73%	88,00%	100,31%
052.C	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Dit. PPP	15.903.000	15.903.000	100,00%	100,00%	100,00%
053	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1.850.000.000	1.786.915.000	96,59%	97,00%	100,42%
053.A	Koordinasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan	1.850.000.000	1.786.915.000	96,59%	97,00%	100,42%
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	2.190.000.000	2.036.281.000	92,98%	93,75%	100,83%
4976.AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	2.190.000.000	2.036.281.000	92,98%	93,75%	100,83%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
051	Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	2.190.000.000	2.036.281.000	92,98%	93,75%	100,83%
051.A	Pengembangan Skema dan Mekanisme Pembiayaan Perolehan Sarusun Dengan Sewa Beli	1.000.000.000	970.807.000	97,08%	98,00%	100,95%
051.B	Penyusunan Tata Laksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM	500.000.000	386.400.000	77,28%	78,00%	100,93%
051.C	Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	690.000.000	679.074.000	98,42%	99,00%	100,59%
BEB	Bantuan Biaya Administrasi	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%	100,19%
4976.BEB.001	Bantuan Biaya Administrasi	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%	100,19%
051	Bantuan Biaya Administrasi	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%	100,19%
051.A	Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA)	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%	100,19%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.720.000.000	5.278.650.000	78,55%	79,00%	100,57%
4976.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.720.000.000	5.278.650.000	78,55%	79,00%	100,57%
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	6.720.000.000	5.278.650.000	78,55%	79%	101%
051.A	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	253.648.000	239.134.000	94,28%	95,00%	100,77%
051.B	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	240.000.000	237.334.000	98,89%	99,00%	100,11%
051.C	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	226.352.000	122.062.000	53,93%	54,00%	100,14%
051.D	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	2.000.000.000	1.556.052.000	77,80%	78,00%	100,25%
051.E	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	2.000.000.000	1.543.661.000	77,18%	78,00%	101,06%
051.F	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan	2.000.000.000	1.580.407.000	79,02%	80,00%	101,24%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
	Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3					
PEA	Koordinasi	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%	100,21%
4976.PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%	100,21%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%	100,21%
051.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tabungan Perumahan Rakyat	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%	100,21%
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	9.500.000.000	7.789.032.000	81,99%	82,34%	100,42%
4976.QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000.000	4.404.011.000	97,87%	98,00%	100,14%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000.000	4.404.011.000	97,87%	98,00%	100,14%
051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	4.500.000.000	4.404.011.000	97,87%	98,00%	100,14%
4976.QAH.002	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berdasarkan Tabungan	5.000.000.000	3.385.021.000	67,70%	68,24%	100,80%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berdasarkan Tabungan	5.000.000.000	3.385.021.000	67,70%	68,24%	100,80%
051.A	Dana Operasional untuk mendukung pelaksanaan PHLN	2.477.345.000	2.397.734.000	96,79%	97,00%	100,22%
051.B	Dana Operasional untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Biaya Administrasi	2.522.655.000	987.287.000	39,14%	40,00%	102,21%
033.WA	Program Dukungan Manajemen	12.677.357.000	11.008.642.000	86,84%	94,62%	108,97%
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
EBA	Layanan Perkantoran	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
4194.EBA.994	Operasionalisasi Kantor Direktorat	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
002	Pelaksanaan Operasional Pekantorat Direktorat PPP	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
002.P	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%	100,28%
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	11.677.357.000	10.011.403.000	85,73%	94,16%	109,63%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5.217.357.000	5.148.575.000	98,68%	99,09%	100,41%
4197.ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	960.244.000	96,02%	97,00%	101,02%
051	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	960.244.000	96,02%	97,00%	101,02%
051.A	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	960.244.000	96,02%	97,00%	101,02%
4197.ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.467.357.000	2.464.604.000	99,89%	100,00%	100,11%
052	Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.467.357.000	2.464.604.000	99,89%	100,00%	100,11%
052.A	Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Rusun Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	2.467.357.000	2.464.604.000	99,89%	100,00%	100,11%
4197.ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.750.000.000	1.723.727.000	98,50%	99,00%	100,51%
051	Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.750.000.000	1.723.727.000	98,50%	99,00%	100,51%
051.A	Pengusahaan Dukungan Pemerintahan terhadap KPBU Perumahan	1.000.000.000	981.908.000	98,19%	99,00%	100,82%
051.B	Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan	750.000.000	741.819.000	98,91%	99,00%	100,09%
AEE	Kemitraan	5.000.000.000	3.714.016.000	74,28%	93,40%	125,74%
4197.AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	5.000.000.000	3.714.016.000	74,28%	93,40%	125,74%
051	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	2.000.000.000	1.816.193.000	90,81%	91,00%	100,21%
051.A	Pelaksanaan Dukungan Transaksi KPBU Perumahan	2.000.000.000	1.816.193.000	90,81%	91,00%	100,21%
052	Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	3.000.000.000	1.897.823.000	94,89%	95,00%	100,11%
052.A	Pendampingan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	2.000.000.000	1.897.823.000	94,89%	95,00%	100,11%
052.B	Pendampingan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1.000.000.000	913.563.000	91,36%	92,00%	100,70%
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%	100,20%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Nilai Efisiensi %
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%
4197.AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%	100,20%
051	Perumusan NPSK Pembiayaan Perumahan	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%	100,20%
051.A	Penyusunan NPSK KPBU Bidang Perumahan	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%	100,20%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	960.000.000	694.713.000	72,37%	73,00%	100,88%
4197.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	960.000.000	694.713.000	72,37%	73,00%	100,88%
057	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	960.000.000	694.713.000	72,37%	73,00%	100,88%
057.A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan	240.000.000	183.420.000	76,43%	77,00%	100,75%
057.B	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan	240.000.000	195.972.000	81,66%	82,00%	100,42%
057.C	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan	240.000.000	168.302.000	70,13%	71,00%	101,25%
057.D	Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	240.000.000	147.019.000	61,26%	62,00%	101,21%
TOTAL PAGU DENGAN BBA		97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%	101,37%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2023 ini dibuat.

Jakarta, Desember 2023

Yang menyepakati,

Kepala Subdirektorat
Legalisasi Rencana Investasi



SN permana Lazuardy

Kepala Subdirektorat
Koordinasi Kerja Sama Investasi



Sukimin Atmosasmito

Kepala Subdirektorat
Kemudahan dan Bantuan
Pembiayaan Perumahan



Samson Sibarani

Mengetahui,
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



R. Haryo Bakti Martoyoedo



Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KARTU KENDALI
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

HAL:
Permohonan Persetujuan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2023

KONSEP

NO	Keterangan	Nama/Jabatan	Paraf/Tgl	Penerima Naskah	Paraf/Tgl
1	Konseptor	Dika Andika Firmansyah	Agi		
		Alvika Rachma Putri			
2	Pemeriksa	Ariastuti	dy		
3	Disetujui oleh	Sukimin Atmosasmito	Skm		

PERSETUJUAN DIREKTUR

Catatan:				Paraf/Tgl	
Segera di-upload				wb	

2	Disetujui tgl				
3	No/Tgl Surat				

PERSETUJUAN DIREKTUR JENDERAL

1	Penerima Naskah				
2	Disetujui tgl				
3	No/Tgl Surat				

ARSIP DAN DISTRIBUSI

1	Distributor				
2	Arsip				